

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Presiden dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, Pemerintah Daerah diwajibkan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Tuntutan kemajuan jaman dan kebutuhan pemerintahan yang transparan menjadi salah satu dasar pentingnya *e-government*. Teknologi informasi di lingkungan pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk mendukung beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, serta aktivitas terkait pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan akan teknologi informasi bagi sebuah Instansi Pemerintahan sangat diperlukan guna menunjang sistem kerja yang ada sehingga pelayanan publik bisa efektif dan efisien. Dengan demikian penerapan teknologi informasi pada sistem kerja Instansi Pemerintahan merupakan solusi guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik menuju terwujudnya *good governance*.

Kemajuan teknologi informasi saat ini, selain digunakan untuk proses administrasi sehari-hari, juga membantu dalam proses pengambilan keputusan beberapa kegiatan memiliki ketergantungan tinggi pada teknologi informasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan peran teknologi informasi bagi instansi pemerintahan. Namun pada penerapan/implementasi teknologi informasi di lingkungan pemerintahan, hasil yang optimal akan tercapai apabila adanya perencanaan pengembangan teknologi informasi atau yang sering disebut **Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Masterplan TIK)**. Dengan perencanaan tersebut diharapkan investasi yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah akan lebih terarah sehingga perbandingan antara biaya dan manfaat yang didapatkan menjadi seimbang.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2018. Diharapkan akan menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Masterplan TIK) di masing-masing Pemerintah Daerah di lingkungan propinsi Jawa Timur. Dengan Rencana Induk Pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (Masterplan TIK) yang telah disusun tersebut, diharapkan dapat menjadipanduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga bisa menjadi alat kontrol dan parameter yang efektif untuk *me-review* performa dan kesuksesan implementasi.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lumajang memandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Teknologi Informasi atau Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung sistem kerja pemerintahan yang meliputi internal pemerintahan, antar instansi dan pelayanan Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada masyarakat. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru berdiri maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam hal ini sebagai lembaga/institusi yang berperan dalam perencanaan, pengembangan dan pengawasan/monitoring dalam penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di kabupaten Lumajang memandang perlu untuk membangun pondasi pengelolaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga dalam penerapannya baik pengelolaan data dan informasi, sumber daya manusia, infrastruktur jaringan dan infrastruktur pendukung lainnya akan menjadi terukur dan terarah.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan IT Master Plan Kabupaten Lumajang ini adalah memberikan gambaran kondisi sistem informasi saat ini dan arahan dalam pengembangan e-government dalam ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Lumajang menuju good governance.

Tujuan penyusunan dokumen Masterplan TIK ini adalah :

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lumajang.
2. Memperbaiki organisasi, sistem manajemen, dan sistem kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.3. Ruang Lingkup

Lingkup penyusunan Master Plan TIK kabupaten Lumajang tahun 2017 adalah membuat rencana jaringan / Topology sebagai landasan dalam mengembangkan sistem informasi yang berkelanjutan di wilayah kabupaten Lumajang hingga tahun 2019.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*

3. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov.Jawa Timur.

1.5. Dasar Pelaksanaan dan Jangka Waktu

Dasar pelaksanaan penyusunan Master Plan TIK kabupaten Lumajang tahun 2017 adalah Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 602.1/1381/427.53/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Jangka waktu pelaksanaan adalah 60 hari kalender semenjak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK).

1.6. Keluaran

Hasil pekerjaan atau keluaran yang diharapkan sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) berupa laporan akhir Master Plan TIK. Struktur atau format laporan yang akan disampaikan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Di dalam pendahuluan bahasan yang akan disampaikan merupakan rangkuman terkait dengan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, referensi hukum, penugasan dan jangka waktu serta hasil pekerjaan.

Bab II Gambaran Umum

Bahasan yang akan disampaikan dalam gambaran umum meliputi :
Gambaran Kabupaten lumajang berdasarkan sejarah, kondisi geografi.

Bab III Metodologi Penyusunan

Bahasan yang akan disampaikan dalam Metodologi dan Penyusunan meliputi penyampaian kajian berdasarkan regulasi yang dipersyaratkan dan membuat matrik kesesuaian antara data (Primer maupun sekunder) dengan regulasi yang harus dipenuhi.

Bab IV Penyusunan Master Plan

Pada bab ini akan dibahas tentang kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini beserta lokasi-lokasi OPD yang ada sampai dengan tersusunnya konsep topologi yang sesuai.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Bahasan yang akan disampaikan dalam kesimpulan dan saran meliputi penyampaian hasil kesimpulan hasil pekerjaan serta saran terhadap tindak lanjut yang harus dilakukan.

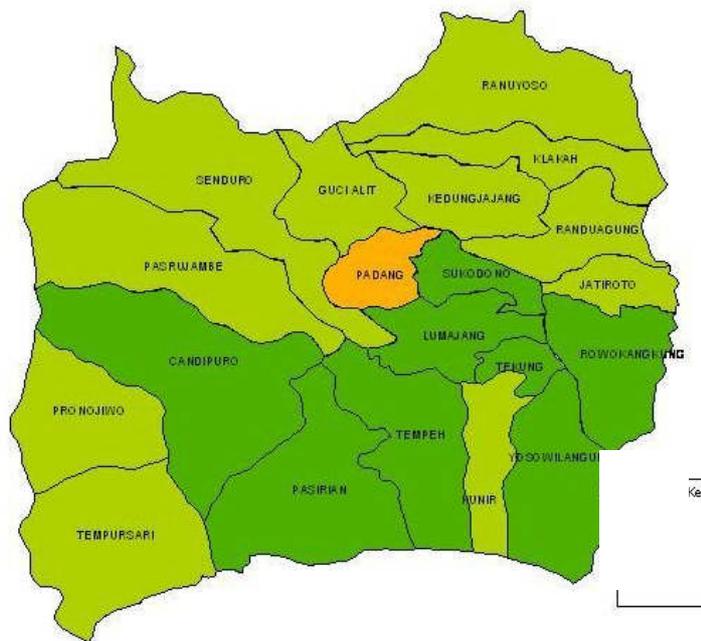
BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Lumajang

a. Kondisi Geografi

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, berjarak 150 Km arah tenggara Surabaya dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama lebih kurang 3 jam.

Secara geografis Lumajang berada pada posisi $112^{\circ} -53' - 113^{\circ} -23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} -54' -8^{\circ} -23'$ Lintang Selatan. Peta administratif kabupaten Lumajang sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 2. 1 Kondisi Geograsi Kabupaten Lumajang

Dimana batas-batas wilayah kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Probolinggo

Selatan : Samudera Hindia

Barat : Kabupaten Malang

Timur : Kabupaten Jember

Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km², di mana dibagi menjadi 21 kecamatan, 195 desa dan 7 kelurahan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson termasuk iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24⁰C – 23⁰C. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperatur terendah mencapai 5⁰C.

b. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang setiap tahun semakin meningkat, sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.103.944 jiwa terdiri dari laki laki : 549.630 jiwa (49,8%), dan perempuan : 554.314 jiwa (50,2%). Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Lumajang di setiap Kecamatan bervariasi, dari yang tertinggi Kecamatan

Pasirian dengan penduduk sekitar 90.638 jiwa dan terendah Kecamatan Tempursari dengan jumlah penduduk sekitar 32.760 jiwa.

c. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang

❖ Visi

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang yang ingin diwujudkan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera, dan Bermartabat”

❖ Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lumajang, ditempuh melalui tiga misi, antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
2. Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

d. Potensi Daerah

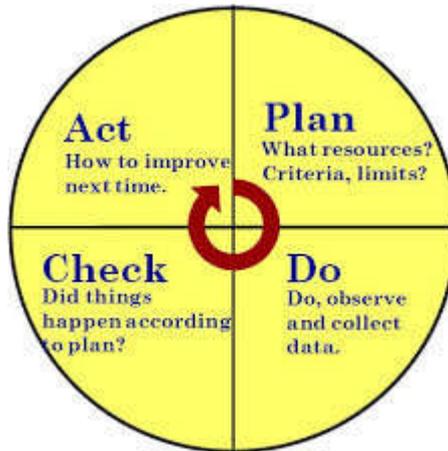
Sebagaimana pada umumnya Kabupaten yang berada di daerah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Meskipun peningkatan paling besar berikutnya adalah pada sektor sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin berkembang.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Prop. Jawa Timur), produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

BAB III METODOLOGI

3.1 Metodologi

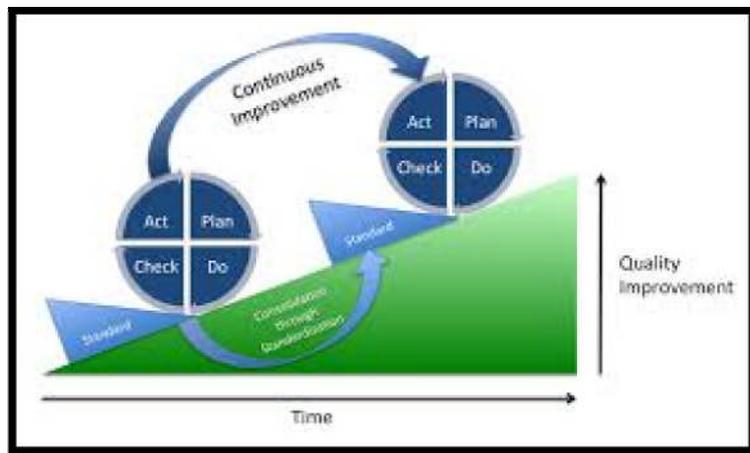
Kerangka berpikir yang diterapkan dalam metodologi Perancangan Master Plan TIK ini adalah dengan menggunakan konsep Plan Do Cek Action sebagaimana pada gambar 3.1 di bawah.



Gambar 3. 1 Konsep PDCA

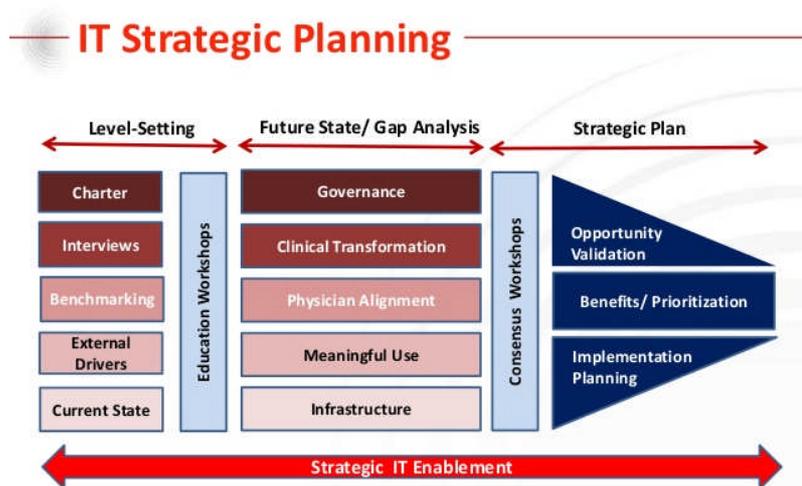
Konsep PDCA memiliki empat tahapan yang harus dilakukan meliputi bagaimana merancang dan menyusun rencana kegiatan mulai dari awal hingga akhir kegiatan yang berupa point-point penting yang dihasilkan dari evaluasi dan pengukuran efektifitas sistem yang ada. Tahapan perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi dan mengukur kondisi yang awal, menentukan tujuan/target yang akan dicapai, membuat analisa kesenjangan/*Gap Analysis* antara kondisi awal dengan target yang dicapai dengan memperhatikan standarisasi dan regulasi yang ada dan menyusun langkah-langkah strategis hasil *gap analysis* serta menetapkan metodologi kegiatan sebagai landasan sistem yang dijalankan. Langkah kedua adalah melakukan implementasi/melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan langkah-langkah strategis yang telah disusun. Selanjutnya langkah ketiga adalah melakukan kegiatan check atau mengevaluasi hasil implementasi yang telah dilakukan, pada tahapan ini langkah-langkah yang dilakukan adalah mengukur dan mengevaluasi dengan menggunakan ukura-ukuran yang telah disusun di awal. Langkah terakhir atau keempat sebagai rangkaian PDCA adalah melakukan kegiatan yang bersifat koordinasi dan manajerial dimana hasil kegiatan ini biasanya dalam bentuk *action plan* atau rencana kegiatan tindak lanjut dari hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Pola penerapan PDCA harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus atau *continuous improvement* sehingga sistem yang terbangun tidak statis namun dinamis seperti bola yang menggelinding pada lintasan yang menanjak. Simbol tanjakan diartikan sebagai perubahan target atau sasaran yang secara berkala semakin lama akan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan perkembangan baik internal maupun eksternal suatu organisasi. Gambaran *continuous improvement* dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 2Ilustrasi Continuous Improvement

Konsep rencana pengembangan sistem informasi sebagaimana gambar 3.2 di bawah ini, secara garis besar tidak lepas dari konsep PDCA.



Gambar 3. 3 Konsep Rencana Strategis IT

Bahwasannya ada tiga komponen tahapan yang harus dilakukan meliputi :

1. Level setting yaitu menggambarkan kondisi awal yang ada pada keseluruhan proses bisnis.
2. Melakukan gap analysis bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara kondisi awal dengan target/sasaran yang akan dicapai.
3. Membuat rencana strategis sesuai dengan tingkat perbedaan pada tiap-tiap tahapan proses bisnis sebagaimana hasil gap analysis yang telah dilakukan.

Untuk mewujudkan realisasi dalam penyusunan Master Plan TIK kabupaten Lumajang tahun 2017 dilakukan dengan menerapkan 2 (dua) tahapan pekerjaan meliputi **Pengumpulan Data dan Penyusunan IT Master Plan.**

A. Metode Pengumpulan Data

Tahap pertama dimulai dari pengumpulan data-data yang dibutuhkan menggunakan beberapa metode, antara lain :

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, namun melalui angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh

responden. Pertanyaan dibuat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta dengan kalimat-kalimat pendek dengan maksud yang jelas. Terdapat kelebihan pada penggunaan kuesioner sebagai metode pengumpulan data, diantaranya pertanyaan yang diajukan dapat dipikirkan terlebih dahulu sehingga jawabannya dapat dipercaya dibandingkan dengan jawaban secara lisan, serta pertanyaan yang diajukan akan lebih tepat dan seragam. Isi kuesioner merupakan inventarisasi infrastruktur TIK beserta pendukungnya yang dibutuhkan dalam penyusunan Masterplan TIK.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung untuk mendapatkan gambaran nyata dari penggunaan teknologi informasi pada OPD, diantaranya melihat web, aplikasi, atau observasi langsung ke kantor OPD.

3. Dokumen

Metode ini dilakukan dengan mempelajari dokumen tertulis maupun elektronik yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Masterplan TIK.

4. Wawancara

Pengambilan data dilakukan secara lisan jika terdapat kebutuhan yang belum cukup dalam penyusunan Masterplan TIK. Metode ini dilakukan melalui tatap muka dan jawaban dari responden dicatat oleh peneliti.

B. Metode Penyusunan Masterplan TIK

Penyusunan Masterplan TIK ini fokus pada menganalisis dan merancang kondisi ideal melalui 3 fase, yaitu :

1. Penganalisaan terhadap Kondisi Saat ini (*Current Condition*)

Pada fase ini dilakukan penggalian informasi mengenai penggunaan teknologi informasi saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dilakukan analisis terhadap aplikasi, infrastruktur jaringan, SDM pendukung, kebijakan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi.

2. Penganalisaan terhadap Kondisi Ideal (*Future State*)

Pada fase ini dilakukan perancangan kondisi atau konsep ideal bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam implementasi teknologi informasi untuk mendukung tercapainya Visi dan Misionya. Rancangan konsep dimaksudkan untuk mendukung seluruh aspek bisnis Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pada fase ini juga dilakukan analisis kondisi internal dan pengaruh eksternal perkembangan TIK.

3. Pengembangan *Transition Plan*

Pada tahap ini dilakukan gap analysis, yaitu analisis terhadap kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ada sehingga dapat mengetahui posisi saat ini untuk menentukan langkah dalam mencapai kondisi yang diharapkan.

BAB IV PENYUSUNAN MASTER PLAN TIK

4.1 Identifikasi Pengembangan IT di Pemerintah Kabupaten Lumajang

Untuk Melaksanakan implementasi e-government dalam rangka pengembangan pelayanan publik secara efektif dan efisien, Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Lumajang perlu melakukan evaluasi terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan melakukan mitigasi atau pemetaan potensi-potensi perkembangan tersebut baik dari sisi internal organisasi maupun sisi eksternal terutama terkait dengan aspek informasi. Untuk dapat mengembangkan sistem informasi yang dapat mendukung terlaksananya implementasi e-goverment tersebut maka diperlukan adanya identifikasi kondisi internal yang ada saat ini. Adapun aspek-aspek yang menjadi landasan tersebut meliputi aspek kelembagaan, aspek hukum dan regulasi, aspek sumber daya manusia, aspek infrastruktur dan aspek sistem informasi.

Gambaran umum kondisi pengembangan IT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang apabila dijabarkan berdasarkan aspek-aspek di atas adalah sebagai berikut :

A. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika diamanatkan menjadi OPD yang berkaitan langsung dengan Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD yang bertanggung jawab menjalankan fungsi TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru berdiri Kendala dan tantangan yang harus di hadapai adalah bagaimana melakukan fungsi koordinato dan membentuk sistem tata kelola dalam bidang teknologi informasi dengan melibatkan peran serta aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sehingga pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang berjalan dengan efektif dan efisien.

Untuk itu, Sebagaimana arahan dari Kementerian komunikasi dan informatika dalam Peraturan menteri komunikasi dan informasi Nomor 41 Tahun 2007 bahwa untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di semua level pemerintahan maka setiap institusi pemerintahan harus menetapkan *Chief Information Officer* (CIO). Adapun tugas dari *Chief Information*

Officer (CIO) adalah mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) pada masing-masing institusi serta bekerja sama dengan satuan kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dan satuan kerja pengguna lainnya.

B. Hukum dan Kebijakan

Kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang belum memiliki dokumen strategi pengembangan e-government sehingga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memiliki panduan dan petunjuk dalam perencanaan strategis pelaksanaan sistem e-government. Hal ini akan berdampak kepada penyelenggaraan pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tidak sinkron dan tidak standar yang akan memicu kerentanan in-efisiensi anggaran. Untuk itu Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan seluruh sumber daya Teknologi Informasi (TI) dapat mendukung dan sejalan dengan rencana strategis instansi.

Dari segi legalitas, belum adanya peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam mengembangkan dan penyelenggaraan e-goverment menjadi kendala bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengembangkan e-goverment sehingga menyebabkan sistem kerja yang berkaitan dengan urusan Komunikasi dan Informatika menjadi kurang optimal, walaupun hal tersebut merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Pada tabel di bawah ini disampaikan detail hukum dan kebijakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

Tabel 4. 1 Hukum dan Kebijakan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
1.	Sekretariat DPRD	PERATURAN : -	PENGEMBANGAN : Website Resmi DPRD Kabupaten Lumajang KEBUTUHAN : - Kekurangan Akses Jaringan Internet yang memadai. - Kekurangan staf IT
2.	Inspektorat Kabupaten Lumajang	PERATURAN : Pasal 47 Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.	PENGEMBANGAN : Sistem Informasi Pelaporan KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI Operasional Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM – HP)
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERATURAN: -	PENGEMBANGAN: 1. Aplikasi Musrenbang (sesuai mandat UU 25 Tahun 2004 , PP Nomor 08 Tahun 2008, Permendagri 54 tahun 2010) 2. Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) (sesuai mandat UU 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 08 Tahun 2014) 3. Aplikasi SITR (Sistem Informasi Tata Ruang) (sesuai mandat UU Nomor 26 Tahun 2007) KEBUTUHAN: Kekurangan staf TI yang handal
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah	PENGEMBANGAN : Website PPID Kabupaten Lumajang KEBUTUHAN :

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
		Kabupaten Lumajang	Kekurangan staf TI
5.	Badan Kepegawaian Daerah	PERATURAN : Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS	PENGEMBANGAN : - Website BKD Kabupaten Lumajang. - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Lumajang. KEBUTUHAN : Kekurangan infrastruktur server dan staf TI
6.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	-	PENGEMBANGAN : Website BPRD Kabupaten Lumajang Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah KEBUTUHAN : Sub domain "bprd.lumajangkab.go.id"
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PERATURAN : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	PENGEMBANGAN : Website BPBD Kabupaten Lumajang KEBUTUHAN : -
9.	Dinas Pendidikan	-	-
10.	Dinas Sosial	-	-
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PERATURAN : Permendagri No. 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan	PENGEMBANGAN : Pelayanan mobile online perekaman KTP-el

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
		Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	KEBUTUHAN : - Akses internet broadband - Peralatan V-SAT - Kekurangan Staf TI
12.	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
13.	Dinas Pertanian	-	-
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PERATURAN : -	PENGEMBANGAN : Website PPID Kabupaten Lumajang KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI
16.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	KEBIJAKAN : 1. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 177.45/347/427.12/2014 tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa pada Jam Kerja di Kabupaten Lumajang 2. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 061.2/154/427.64/2015 Perihal Dukungan Desa terhadap Program KB Tahun 2015	PENGEMBANGAN : - KEBUTUHAN : -

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
17.	Dinas Lingkungan Hidup	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website DLH Kabupaten Lumajang KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website pariwisata Lumajang
19.	Dinas Perdagangan	PERATURAN : Belum mempunyai aturan tentang TIK, masih dalam proses pembuatan	-
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	PERATURAN : Perbub No.12 tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website DISPORA Kab.Lumajang KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PERATURAN : - PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : - Website PPID Kabupaten Lumajang - Sistem Informasi Layanan Publik
	LPSE	- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 - Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	PENGEMBANGAN : Keamanan lebih terjamin lagi KEBUTUHAN :

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
		(lembaran negara tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4843); - Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ;	Staf TI
22.	Dinas Tenaga Kerja	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website PPID Kabupaten Lumajang WEBSITE : Kekurangan staf TI
23.	Dinas Kesehatan	Keputusan Menetri Kesehatan RI Nomor 932/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	Sik_puskesmas, SIKDA Generik, Surat Menyurat
24.	Dinas Perhubungan	-	-
25.	Dinas Perikanan	-	PENGEMBANGAN : - Penyediaan Data Pegawai - Aplikasi Data Kelompok/pelaku usaha perikanan - Pengembangan Wilayah Pesisir
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-
28.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-
30.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	-
31.	RSUD dr.Haryoto	PERATURAN : Perbup No.12 tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website RSUD dr.Haryoto
32.	RSUD Pasirian	-	-
33.	Bagian Administrasi Pemerintahan	-	-
34.	Bagian Hukum	PERATURAN : Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	PENGEMBANGAN : Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang factual dan terintegrasi KEBUTUHAN : Kekurangan Staf TI
35.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	-
36.	Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian	-	-
37.	Bagian Pembangunan	PERATURAN: Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di	PENGEMBANGAN: Aplikasi Monev

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
		Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang	KEBUTUHAN: Kekurangan Infrastruktur
38.	Bagian Organisasi	PERATURAN : PERPRES 29/2014 tentang SAKIP PERBUP 26/2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemkab Lumajang	PENGEMBANGAN : Aplikasi SAKIPLO KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI
39.	Bagian Humas dan Protokol	-	-
40.	Bagian Umum	-	-
41.	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	-	-
42.	Kecamatan Lumajang	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website PPID Kabupaten Lumajang KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI
43.	Kecamatan Sukodono	-	-
44.	Kecamatan Padang	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website PPID Kabupaten Lumajang KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
45.	Kecamatan Gucialit	-	-
46.	Kecamatan Senduro	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website Kec. Senduro KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI
47.	Kecamatan Pasrujambe	-	-
48.	Kecamatan Sumbersuko	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website Kecamatan Sumbersuko KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI
49.	Kecamatan Tempeh	-	-
50.	Kecamatan Pasirian	-	-
51.	Kecamatan Candipuro	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Sosial media terkait Informasi Potensi (ipot) kewilayahan KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
52.	Kecamatan Pronojiwo	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : -
53.	Kecamatan Tempursari	-	-
54.	Kecamatan Kunir	-	-
55.	Kecamatan Yosowilangun	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	-
56.	Kecamatan Tekung	-	-
57.	Kecamatan Rowokangkung	lya	KEBUTUHAN : - Rencana membuat website kecamatan - Penunjukan Pengelola TIK Kecamatan
58.	Kecamatan Jatiroto	KEBIJAKAN : Surat Kebijakan Himbauan Camat Jatiroto kepada Kepala Desa untuk mempersiapkan Tertib Administrasi Laporan Kependudukan dalam rangka persiapan Laporan Kependudukan berbasis online di Kecamatan Jatiroto	PENGEMBANGAN : Jaringan Online Laporan Kependudukan antar Kecamatan dan Desa KEBUTUHAN : Kekurangan sarana jaringan online dan SDM yang cekatan

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
59.	Kecamatan Randuagung	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Website PATEN Kecamatan KEBUTUHAN : Tidak ada staf TI, yang ada operator word dan excel
60.	Kecamatan Klakah	-	-
61.	Kecamatan Ranuyoso	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	KEBUTUHAN : Tidak adanya staf TI
62.	Kecamatan Kedungjajang	-	-
63.	PDAM	-	PENGEMBANGAN : Program aplikasi billing system dan pembacaan meter. KEBUTUHAN : Kekurangan Staf TI,Kekurangan kelengkapan penunjang TI
64.	PD. Semeru	-	-
65.	PD. Bank Pasar	-	-
66.	Kelurahan Jogotrunan	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Blog Kelurahan Jogotrunan KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI

No	SKPD	KEBIJAKAN	PENGEMBANGAN
67.	Kelurahan Rogotrunan	-	-
68.	Kelurahan Jogoyudan	-	-
69.	Kelurahan Ditotrunan	-	-
70.	Kelurahan Citrodiwangsan	PERATURAN : Peraturan Bupati No.12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	PENGEMBANGAN : Blog Kelurahan Citrodiwangsan KEBUTUHAN : Kekurangan staf TI
71.	Kelurahan Tompokersan	-	-
72.	Kelurahan Kepuharjo	-	-

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada era global saat ini, perkembangan kebutuhan akan internet sebagai salah satu sarana dalam membentuk komunikasi dan perkembangan informasi menuntut kita sebagai penggunanya untuk selalu mengembangkan diri baik dari sisi intelegensia maupun dari sisi perilaku/moral. Penggunaan sistem informasi yang telah berkembang sedemikian rupa hingga saat ini harus dibarengi dengan perubahan-perubahan pola pikir dan bagaimana cara mengelolanya supaya efektif dan efisien. Untuk itu, maka pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan IT/sistem informasi yang ada. Pengembangan tersebut selain untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola juga dimungkinkan untuk melakukan perencanaan secara umum sehingga permasalahan-permasalahan yang kecil dapat ditangani sendiri. Sehingga dengan kemampuan tersebut akan berpengaruh pula terhadap penggunaan anggaran supaya lebih efektif dan efisien. Perkembangan TI / sistem informasi akan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang secara operasional dapat mempermudah proses pelayanan sehingga mutu layanannya akan lebih sempurna, efisien, dan cepat. Dengan adanya keuntungan perkembangan TI / sistem informasi tersebut maka peningkatan kualitas SDM untuk pemahaman terhadap dan pengembangan dan pengelolaan TIK akan menjadi syarat mutlak supaya sistem yang telah dikembangkan menjadi berdaya guna. Sebagai gambaran kondisi dan kemampuan SDM saat ini dalam mengelola Ti / sistem informasi berikut disajikan data SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

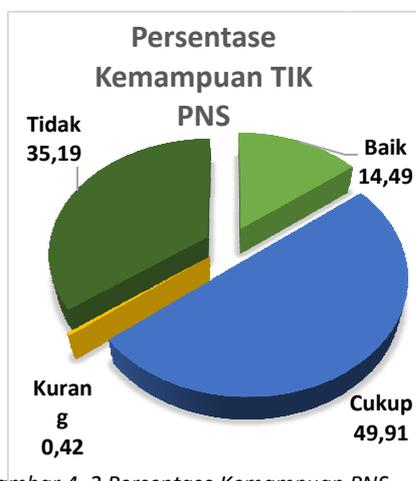
Tabel 4. 2 SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

No.	OPD	PNS			Non PNS		
		Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan TIK	Kemampuan (Baik/Cukup/Kurang)	Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan TIK	Kemampuan (Baik/Cukup/Kurang)
1	Sekretariat DPRD	30	24	Cukup	22	14	Cukup
2	Inspektorat	30	30	Cukup	5	4	Cukup
3	Badan Kepegawaian Daerah	50	45	Cukup	30	25	Cukup
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	11	Cukup	8	7	Cukup
5	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	28	25	Baik	113	80	Cukup
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	11	Cukup	37	35	Cukup
7	Badan Pengelola Keuangan Daerah	41	41	Cukup	28	28	Cukup

No.	OPD	PNS			Non PNS		
		Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan TIK	Kemampuan (Baik/Cukup/Kurang)	Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan TIK	Kemampuan (Baik/Cukup/Kurang)
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	0	Cukup	15	2	Cukup
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29	29	Baik	28	28	Baik
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	14	Baik	24	24	Baik
11	Dinas Kesehatan	73	73	Cukup	56	40	Cukup
12	Dinas Ketahanan Pangan	22	22	Baik	22	22	Baik
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	19	Baik	24	24	Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	23	18	Cukup	13	10	Cukup
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41	36	Cukup	125	52	Cukup
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	170	65	Cukup	124	55	Cukup
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	18	cukup	23	23	cukup
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	22	18	Cukup	22	18	Cukup
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21	21	Baik	11	9	Baik
20	Dinas Pendidikan	64	60	Cukup	28	25	Cukup
21	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemebrdayaan Perempuan	71	65	Cukup	18	16	Cukup
22	Dinas Perdagangan	104	4	Cukup	107	4	Cukup
23	Dinas Perhubungan	150	28	Baik	123	29	Baik
24	Dinas Perikanan	28	28	Baik	18	8	Baik
25	Dinas Pertanian	160	150	Cukup	225	190	Cukup
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20	18	Baik	42	36	Baik
27	Dinas Sosial	21	17	Baik	14	13	Baik
28	Dinas Tenaga Kerja	8	8	Cukup	11	9	Cukup
29	Dinas Lingkungan Hidup	301	50	Baik	137	32	Baik
		*Pegawai PNS Lapangan 251 orang			*Pegawai Non PNS lapangan 105 orang		
30	Satuan Polisi Pamong Praja	59	10	Cukup	128	10	Cukup

No.	OPD	PNS			Non PNS		
		Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan TIK	Kemampuan (Baik/Cukup/Kurang)	Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan TIK	Kemampuan (Baik/Cukup/Kurang)
31	RSUD dr.Haryoto	391	350	Cukup	333	279	Cukup
32	RSUD Pasirian	36	36	Cukup	229	229	Cukup
33	Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian	10	9	Baik	3	3	baik
34	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	13	13	Cukup	6	6	Cukup
35	Bagian Administrasi Pemerintahan	7	7	Baik	4	4	Baik
36	Bagian Hukum	8	8	Cukup	5	5	Cukup
37	Bagian Humas dan Protokol	13	12	Cukup	13	13	Cukup
38	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	7	6	Cukup	6	6	Cukup
39	Bagian Organisasi	12	8	baik	4	4	baik
40	Bagian Pembangunan	10	10	Baik	3	3	Baik
41	Bagian Umum	52	30	Cukup	55	33	Cukup
42	Kecamatan Candipuro	17	13	Baik	7	6	Baik
43	Kecamatan Gucialit	22	21	Cukup	7	4	Baik
44	Kecamatan Jatiroto	12	5	Baik	6	6	Baik
45	Kecamatan Kedungjajang	19	14	Baik	24	24	Baik
46	Kecamatan Klakah	16	7 6 3	Baik Cukup Kurang	7	4 1 2	Baik Cukup Kurang
47	Kecamatan Kunir	16	7	Cukup	6	4	Baik
48	Kecamatan Lumajang	13	13	Baik / cukup	7	7	Baik / cukup
49	Kecamatan Padang	19	11	Baik	6	4	Baik
50	Kecamatan Pasirian	17	15	Cukup	7	6	Cukup
51	Kecamatan Pasrujambe	16	11	Cukup	8	6	Cukup
52	Kecamatan Pronojiwo	15	10	Cukup	9	7	Cukup
53	Kecamatan Randuagung	14	7	Cukup	8	8	Cukup
54	Kecamatan Ranuyoso	13	11	Baik	5	5	Baik
55	Kecamatan Rowokangkung	12	8	Kurang	6	4	Cukup
56	Kecamatan Senduro	18	7	Cukup	8	6	Cukup

No.	OPD	PNS			Non PNS		
		Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan TIK	Kemampuan (Baik/Cukup/Kurang)	Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan TIK	Kemampuan (Baik/Cukup/Kurang)
57	Kecamatan Sukodono	16	13	Cukup	7	7	Cukup
58	Kecamatan Sumbersuko	15	7	Cukup	7	5	Cukup
59	Kecamatan Tekung	19	15	Cukup	5	4	Cukup
60	Kecamatan Tempeh	17	10	Cukup	10	8	Cukup
61	Kecamatan Tempursari	14	12	Cukup	7	6	Cukup
62	Kecamatan Yosowilangun	15	12	Cukup	10	7	cukup
63	Perusahaan Daerah Air Minum	-	-	-	140	50	kurang
64	PD Semeru	-	-	-	7	3	Baik
65	PD Bank Pasar	-	-	-	26	23	Baik
66	Kelurahan Citrodiwangsan	10	4	Cukup	4	4	Cukup
67	Kelurahan Ditotrunan	6	4	Cukup	7	6	Baik
68	Kelurahan Jogotrunan	7	3	Cukup	5	3	Cukup
69	Kelurahan Jogoyudan	5	1	Baik	3	1	Baik
70	Kelurahan Kepuharjo	6	5	Cukup	5	3	Cukup
71	Kelurahan Rogotrunan	12	5	Cukup	4	2	Cukup
72	Kelurahan Tompokersan	6	2	Baik	8	7	Cukup



Gambar 4. 2 Persentase Kemampuan PNS



Gambar 4. 1 Persentase Kemampuan Non PNS

Pemerintah Daerah diharapkan mampu membuka transaksi pelayanan publik melalui media teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat dan

mudah dijangkau secara interaktif. Pelayanan seperti ini sangat bergantung pada kemampuan SDM pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jumlah pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten Lumajang adalah 5229 dengan rincian PNS sejumlah 2637 dan Non PNS sejumlah 2592. Kemampuan pegawai dalam mengoperasikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi(TIK) dibagi dalam 2 kategori yaitu **Bisa** dan **Tidak**.

Dimana kategori **Bisa** memiliki 3 indikator yaitu **baik** (dapat menggunakan Microsoft Office, jaringan internet, dapat mengoperasikan *smartphone*, dan software desain grafis), **cukup** (dapat menggunakan Microsoft Office, jaringan internet, dan dapat mengoperasikan *smartphone*), **kurang** (dapat menggunakan *Handphone*, Microsoft Word, dan Microsoft Excel). Sedangkan untuk kategori **Tidak**, pegawai hanya dapat mengoperasikan *Handphone*.

Berdasarkan data yang ada, kemampuan pegawai dengan kategori **Bisa** mengoperasikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi(TIK) terdiri dari PNS sebesar 64,18% dan Non PNS sebesar 64,7%. Sedangkan untuk kategori **Tidak** terdiri dari PNS sebesar 35,19% dan Non PNS sebesar 35,30%.

D. Infrastruktur

Pemanfaatan media internet pada instansi dalam pengelolaan data yang tidak lepas dari penggunaan komputer/laptop/netbook yang merupakan alat proses pertukaran data antar pengguna. Proses pertukaran data antar instansi yang cepat dan tepat bergantung kepada ketersediaan fasilitas komputer/laptop/netbook dan jaringan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menggunakan bantuan komputer/laptop/netbook dalam mendukung sistem operasional kerjanya, dimana sistem operasi yang digunakan pada umumnya adalah Microsoft Windows baik yang sudah berlisensi maupun yang belum berlisensi. Berikut ini disajikan data-data ketersediaan sarana dan prasarana TI yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tabel di bawah ini.

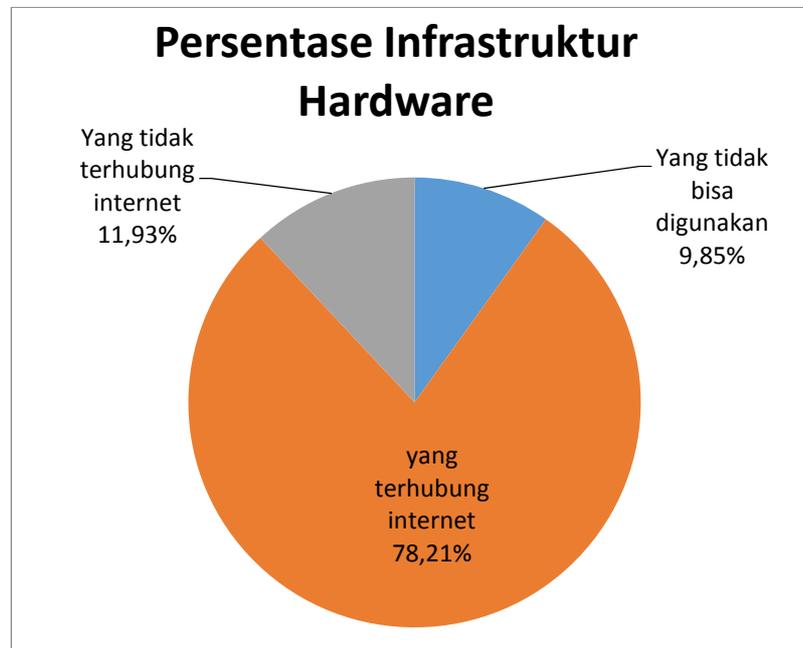
Tabel 4. 3 Infrastruktur Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

No	OPD	Komputer			Laptop		
		Seluruhnya	Yang dapat digunakan	Yang terhubung internet	Seluruhnya	Yang dapat digunakan	Yang terhubung internet
1	Sekretariat DPRD	32	9	9	27	10	10
2	Inspektorat	7	7	7	19	18	17
3	Badan Kepegawaian Daerah	46	46	46	14	14	14
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	9	9	4	4	4
5	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	59	59	57	16	16	16
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	8	7	4	4	1
7	Badan Pengelola Keuangan Daerah	58	54	54	14	12	12
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40	40	40	4	4	0
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	60	40	30	6	6	6
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30	25	25	10	6	6
11	Dinas Kesehatan	58	58	58	42	42	42
12	Dinas Ketahanan Pangan	9	6	6	10	7	7
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	52	48	46	9	9	6
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	30	23	20	11	8	8
15	Dinas Lingkungan Hidup	20	19	19	22	18	18
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	32	32	29	8	7	7
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	69	67	65	4	4	4
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21	20	15	17	16	16
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	10	8	8	4	4	4

No	OPD	Komputer			Laptop		
		Seluruhnya	Yang dapat digunakan	Yang terhubung internet	Seluruhnya	Yang dapat digunakan	Yang terhubung internet
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	16	16	4	3	3
21	Dinas Pendidikan	72	72	72	27	27	27
22	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemebrdayaan Perempuan	38	38	17	31	16	16
23	Dinas Perdagangan	25	25	25	19	19	-
24	Dinas Perhubungan	14	14	14	2	2	2
25	Dinas Perikanan	23	18	15	14	12	9
26	Dinas Pertanian	109	109	109	12	12	4
27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	2	2	2	2
28	Dinas Sosial	15	15	11	4	4	4
29	Dinas Tenaga Kerja	8	8	6	7	7	7
30	Satuan Polisi Pamong Praja	4	4	3	6	6	4
31	RSUD dr.Haryoto	120	120	34	21	21	21
32	RSUD Pasirian	39	39	39	2	2	-
33	Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian	10	10	10	6	5	5
34	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	15	11	11	4	3	3
35	Bagian Administrasi Pemerintahan	14	9	6	5	3	3
36	Bagian Hukum	11	11	11	4	2	-
37	Bagian Humas dan Protokol	10	10	10	6	5	5
38	Bagian Keuangan dan	7	7	7	3	3	3

No	OPD	Komputer			Laptop		
		Seluruhnya	Yang dapat digunakan	Yang terhubung internet	Seluruhnya	Yang dapat digunakan	Yang terhubung internet
	Kepegawaian						
39	Bagian Organisasi	17	13	12	4	3	3
40	Bagian Pembangunan	20	11	11	6	5	Kalau ada wifi/ jaringan kabel
41	Bagian Umum	31	31	31	15	15	15
42	Kecamatan Candipuro	9	9	9	4	4	4
43	Kecamatan Gucialit	14	14	7	5	5	5
44	Kecamatan Jatiroto	10	9	7	5	5	5
45	Kecamatan Kedungjajang	30	25	25	10	6	6
46	Kecamatan Klakah	10	7	3	5	1	1
47	Kecamatan Kunir	8	8	8	6	4	4
48	Kecamatan Lumajang	15	10	10	5	5	5
49	Kecamatan Padang	11	10	9	4	3	3
50	Kecamatan Pasirian	11	11	9	6	6	6
51	Kecamatan Pasrujambe	7	7	5	3	3	3
52	Kecamatan Pronojiwo	10	10	9	4	4	4
53	Kecamatan Randuagung	9	9	9	1	1	1
54	Kecamatan Ranuyoso	10	9	5	7	5	5
55	Kecamatan Rowokangkung	12	9	2	7	5	3
56	Kecamatan Senduro	8	6	4	5	5	3
57	Kecamatan Sukodono	9	9	3	4	1	1
58	Kecamatan Sumpusuko	11	11	5	2	2	2
59	Kecamatan Tekung	11	9	5	6	5	4
60	Kecamatan Tempeh	8	8	7	4	4	1
61	Kecamatan Tempursari	9	9	9	2	2	2
62	Kecamatan Yosowilangun	7	7	7	5	4	4

No	OPD	Komputer			Laptop		
		Seluruhnya	Yang dapat digunakan	Yang terhubung internet	Seluruhnya	Yang dapat digunakan	Yang terhubung internet
63	Perusahaan Daerah Air Minum	36	36	36	16	16	16
64	PD. Semeru	2	2	2	3	3	3
65	PD. Bank Pasar	10	10	1	3	3	3
66	Kelurahan Citrodiwangsan	5	4	4	2	2	-
67	Kelurahan Ditotrunan	5	5	5	1	1	1
68	Kelurahan Jogotrunan	5	5	5	1	1	1
69	Kelurahan Jogoyudan	6	6	6	1	1	1
70	Kelurahan Kepuharjo	6	5	3	2	1	1
71	Kelurahan Rogotrunan	7	5	5	2	2	2
72	Kelurahan Tompokersan	8	8	5	1	1	1



Gambar 4. 3 Persentase Infrastruktur Hardware

Dalam penerapan *e-government*, komputer memiliki peran yang sangat penting. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menggunakan bantuan komputer sebagai sarana utama dalam sistem kerjanya akan tetapi tidak semua SDM memanfaatkan komputer dan jaringan komputer untuk menunjang operasional kegiatannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden 72 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), jumlah komputer sebanyak 2162 dimana komputer yang dapat digunakan sebanyak 1949 dan yang tidak dapat digunakan sejumlah 213. Dari jumlah komputer yang dapat digunakan tersebut terdapat 1691 komputer yang terhubung jaringan komputer dan 258 komputer yang tidak terhubung jaringan komputer.

Tabel 4. 4 Infrastruktur Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

No	SKPD	ISP	Produk	Bandwidth (Mbps)	Nomor Line/Telepon	Biaya per bulan
1.	Inspektorat	TELKOM	Speedy		152504200261	715.500/bln
		TELKOM	Speedy		15254205681	450.000/bln
2.	Sekretariat DPRD	TELKOM	Indihome	Saat ini : 65 Mbps Pengembangan : 72 Mbps	152504206623 152504206624	297,5rb /bln 297,5rb /bln
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TELKOM BIZNET	Speedy BIZNET	Saat Ini : Mbps Saat Ini : 30 Mbps	(0334) 883516	1.430 .000/bln 13 jt/bulan
4.	Badan Kepegawaian Daerah	BIZNET	Biznet Dedicated Internet	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 15 Mbps	(0334) 890135	4,5jt / bln
		BIZNET	Biznet Dedicated Internet	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 100 Mbps	(0334) 890135	4,5jt / bln
5.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	BIZNET	Metronet 4	Saat Ini : 100 Mbps Pengembangan : Belum	1	3,500,000
		BIZNET	Dedicated	Saat Ini : 100 Mbps	4 IP Public	16,000,000
6.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	TELKOM BIZNET	Speedy Metro	Saat ini : 50 Mbps Saat ini : 100 Mbps	0152504200192 -	11.253.250 3.856.000
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TELKOM	Speedy	Saat ini : 10 Mbps	(0334) 881586	300rb/bulan
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TELKOM	Speedy	Download : 22 Mbps Upload : 4 Mbps	(0334) 8780808	460 rb / bln
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Biznet	Dedicate	Saat ini : 25 Mbps	-	11.500.000/bln
		Biznet	Metronet	Saat ini : 75 Mbps	-	2.500.000/bln
		Telkom	ASTI Net	Saat ini : 10 Mbps	-	13.500.000/bln
		Telkom	Indihome	Saat ini : 20 mbps	-	Gratis
		Telkom	Indihome	Saat ini : 1 Mbps	(0334) 885344 / 887461	700.000/bln
		Telkom	Indihome	Saat ini : 10 Mbps	-	600.000/bln
		Telkom	Indihome	Saat ini : 1 Mbps	-	Gratis

No	SKPD	ISP	Produk	Bandwidth (Mbps)	Nomor Line/Telepon	Biaya per bulan
		Telkom	ASTI Net	Saat ini : 7 Mbps	(0334) 893025	5.000.000/bln
10.	Dinas Pendidikan	TELKOM	Speedy	Saat ini : 20 Mbps Pengembangan : 25 Mbps	(0334) 890272	1 juta / bln
11.	Dinas Sosial	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 3 Mbps	(0334) 888155	770.500 rb / bln
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Telkom	Speedy Gold Speedy VPN-IP	10Mbps 2Mbps 768kbps 3072kbps	152504208009 152504201266 4702844-08940 4702844-07793	3.710.000 715.500 20.020.000
13.	Dinas Ketahanan Pangan	BIZNET	BIZNET	Saat ini : 700 Mbps Pengembangan : 1200 Mbps	(0334) 881247	1.600.000
14.	Dinas Pertanian	TELKOM	Indihome	Saat ini : 20 Mbps	(0334) 892916 – 892917	750rb/bln
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 20 Mbps Pengembangan : 30 Mbps	152504200324	968.000 rb / bln
		TELKOM	Speedy	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 20 Mbps	152504206921	215.000 rb / bln
		TELKOM	Speedy	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 20 Mbps	152535200293	275.000 rb / bln
		TELKOM	IndiHome	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 20 Mbps	152504203495	165.600 rb / bln
		TELKOM	IndiHome	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 20 Mbps	152504300180	283.000 rb / bln
		TELKKOM	IndiHome	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 20 Mbps	152504300467	175.000 rb / bln
16.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan	TELKOM	Speedy	Saat ini : 3 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	4861625 (No.Jastel)	1.439.000/bln
17.	Dinas Lingkungan Hidup	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 5 Mbps Pengembangan : -	(0334) 8780990	1.900.000 rb / bln
		BIZNET	Biznet	Saat ini : 15 Mbps	08113081414	6.611.000 rb / bln

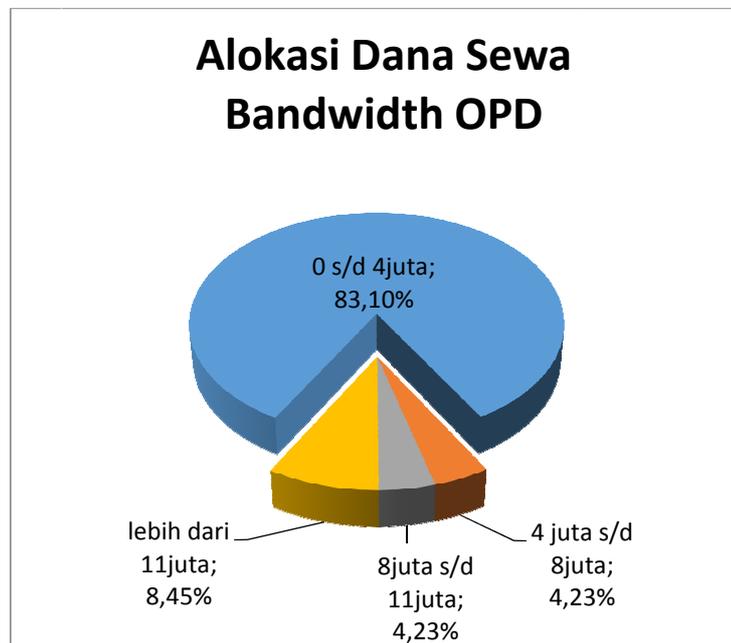
No	SKPD	ISP	Produk	Bandwidth (Mbps)	Nomor Line/Telepon	Biaya per bulan
				Pengembangan : -		
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	ASTINET	ASTINET	Saat Ini: 29 mbps	88111500004856923 152504301890	Rp 1.375.000,-
		Indihome	Telekomunikasi Indonesia	Saat ini: 30 mbps	0334882058	Rp 903.600,-
		Speedy	Telkom	Saat ini: 50 mbps	03344546061	Rp 569.471,-
		Speedy		Saat ini: 29 mbps		Rp 341.000,-
19.	Dinas Perdagangan	Telkom	Speedy	Saat ini : 20 Mbps	(0334) 893661	800 rb / bln
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	TELKOM	Speedy	Saat ini : 3 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	(0334) 888396	500.000/bln
		TELKOM	Speedy	-	(0334) 8780635	250.000/bln
21.	Dinas Tenaga Kerja	TELKOM	Speedy	20 Mbps	(0334) 881546	774rb/bln
22.	Dinas Kesehatan	Telkom	Speedy Gold	Saat ini : 2 Mpbps	0334 890278	800rb/bln
		Biznet	Metronet 1	Saat ini : 25 Mbps	-	800rb/bln
		Biznet	Metronet 1	Saat ini : 25 Mbps	-	800rb/bln
23.	Dinas Perhubungan	TELKOM	Speedy	20 Mbps	(0334) 893661	800.000
24.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	TELKOM	Indihome	5 Mbps 10 Mbps	- 0152504206377	217000
25.	Dinas Perikanan	TELKOM	Speedy	Download : 9.52 Mbps Upload : 1.44 Mbps	-	1,899jt / bln
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	TELKOM	Speedy	Fiber Optik : 10 Mbps	152504202923 (0334) 8795974 (0334) 8795975 (0334) 8795976 152504302149	325.000/bln 151.500/bln 755.210/bln 297.500/bln 350.726/bln
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Telkom	Speedy	Saat ini : 512 Kbps	(0334) 881467	Rp. 217.500
		Telkom	Indihome	Saat ini : 10 MBPS	(0334) 891662	Rp. 341.500
28.	Dinas Perumahan dan Kawasan	TELKOM	Speedy	10 Mbps	(0334) 890388	487rb / bln

No	SKPD	ISP	Produk	Bandwidth (Mbps)	Nomor Line/Telepon	Biaya per bulan
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TELKOM	Speedy	Saat ini : 5 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	-	2.000.000/bln
		BIZNET	-	Saat ini : 15 Mbps Pengembangan : 15 Mbps	-	6.606.000/bln
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	TELKOM MODEM	SPEEDY		(0334) 887467	250.000/bulan
31.	RSUD dr.Haryoto	BIZNET	Metronet	Saat ini : 75 Mbps	-	2.200.000/bln
			Dedicated	25 Mbps	-	5.500.000/bln
32.	Pasirian RSUD	TELKOM	IndiHome	100 Mbps	(0334) 5761044	1.700.000rb/bln
33.	Bagian Administrasi Pemerintahan	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 512 Kbps Pengembangan : 40 Mbps	(0334) 887464	340rb / bln 750rb / bln
		TELKOM	Speedy	Saat ini : 100.0 Mbps Pengembangan : 500.0 Mbps	(0334) 884565	740 rb/ bln
35.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	TELKOM	Indihome	Saat ini : 20 Mbps Pengembangan : 25 Mbps	(0334) 8796363	820rb/bln
36.	Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian	TELKOM	Indihome	Saat Ini : 20 Mbps	(0334) 881194	500rb / bln
37.	Bagian Organisasi	Telkom	Speedy	Saat ini : 20 Mbps Pengembangan unlimited	(0334)883210	531.300,-
38.	Bagian Umum	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 5 Mbps Pengembangan : --	(0334) 892191	1.282.000 / bln
		TELKOM	Speedy	Saat Ini : 2 Mbps Pengembangan : --	152504200451	305.000 / bln
39.	Bagian Humas dan Protokol	BIZNET	METRONET 1	Saat Ini : 25 Mbps	021 5799888	883rb / bln
		DUNIA WIFI	--	Saat Ini : 22 Mbps	081234673000 085784076001	750rb / bln
40.	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	TELKOM	Speedy	Saat ini : 25 Mbps	(0334) 881507	883rb/bln

No	SKPD	ISP	Produk	Bandwidth (Mbps)	Nomor Line/Telepon	Biaya per bulan
41.	Bagian Pembangunan	Telkom	Speedy	Saat ini: 5 Mbps Pengembangan: -	(0334) 883585	1.964.250 per bulan
42.	Kecamatan Tempursari	TELKOM	Speed	Saat ini : 2 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	(0334) 591082	650rb/bln
43.	Kecamatan Pronojiwo	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 100 Mbps Pengembangan : 100 Mbps	(0334) 8780990	743rb / bln
44.	Kecamatan Candipuro	TELKOM	Indihome	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 20 Mbps	(0334) 571551	450 rb / bln
45.	Kecamatan Pasirian	TELKOM	Fiber Indihome	10 Mbps	(0334) 5761066	420rb / bln
46.	Kecamatan Tempeh	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 5 Mbps	(0334) 520003	715rb / bln
		TELKOM	IndieHome	Saat ini : 10 Mbps	15254200148	250rb / bln
47.	Kecamatan Lumajang	BIZNET	-	Saat ini : 5 Mbps	(0334) 881137	- 743 rb / bulan - 881 rb / bulan
48.	Kecamatan Sumpersuko	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 1 Mbps	0152-504202323	250rb / bln
			Indihome	Saat Ini : 10 Mbps	0152-504207614	715rb / bln
49.	Kecamatan Tekung	TELKOM	Indihome	Saat ini : 6,5 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	(0334) 882283	748.000/bln
50.	Kecamatan Yosowilangun	TELKOM	Speedy	2 Mbps	3918333	763.240
		TELKOM	Indihome	10 Mbbs	152535200574	531.800
51.	Kecamatan Rowokangkung	TELKOM	-	-	-	750rb/bln
52.	Kecamatan Jatiroto	TELKOM	Speedy	3 Mbps	152541200438	711.500
			Indihome	3 Mbps	152541203190	197336
53.	Kecamatan Randuagung	TELKOM	Speedy	Saat ini : 3 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	(0334) 323313	715.000
54.	Kecamatan Sukodono	TELKOM	Speedy (Indihome)	Saat Ini : 6.5 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	(0334) 881286	748rb / bln
55.	Kecamatan Padang	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 3 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	0334-893264	750 rb / bln
56.	Kecamatan Pasrujambe	TELKOM	Speedy	Saat ini : 1 Mbps Pengembangan : 1 Mbps	(0334) 610836	750rb / bln

No	SKPD	ISP	Produk	Bandwidth (Mbps)	Nomor Line/Telepon	Biaya per bulan
57.	Kecamatan Senduro	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 3 Mbps	0152-534200215	700rb / bln
		TELKOM	Speedy	Saat Ini : 3 Mbps	(0334) 610879	500rb / bln
58.	Kecamatan Gucialit	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 40 Mbps	(0334) 887659	1381000 / bln
59.	Kecamatan Kedungjajang	Telkom	Speedy Gold Speedy VPN-IP	10Mbps 2Mbps 768kbps 3072kbps	152504208009 152504201266 4702844-08940 4702844-07793	3.710.000 715.500 20.020.000
60.	Kecamatan Klakah	TELKOM	Speedy (Abunemen) Indihome	3 P	152533200165 152533200978	700 rb / bln 300 rb/ bln
61.	Kecamatan Kunir	Telkom	Indihome	Saat Ini : 10 Mbps Pengembangan : 15 Mbps	(0334) 520793	500rb / bln
62.	Kecamatan Ranuyoso	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 1 Mbps		743 rb / bln
		TELKOM	Speedy	Saat Ini : 1 Mbps		743 rb / bln
63.	Perusahaan Daerah Air Minum	Telkom	Speedy	10 Mbps	(0334) 886731	1.282.000/bln
		Telkom	Speedy	3 Mbps	(0334) 882123	872.000/bln
		Telkom	Astinet	4 Mbps	-	6.000.000/bln
64.	PD. Semeru	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 3 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	(0334) 8780017	350rb / bln
65.	PD. Bank Pasar	TELKOM	Speedy	Saat Ini : 5 Mbps	(0334) 881086	250rb/bln
		TELKOM	VPN	Saat Ini : 128 KBPS	Fiber Optik	1.250rb/bln
66.	Kelurahan Citrodiwangsan	TELKOM	Speedy	Saat ini : 3 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	(0334) 8780119	500rb/bln
67.	Kelurahan Rogotrunan	Biznet	Biznet Home	3.2 Mbps		404 rb/bln
68.	Kelurahan Ditotrunan	TELKOM	Speedy	Saat ini : 40 Mbps Pengembangan : 40 Mbps	(0334) 886652	515rb / bln
69.	Kelurahan Jogoyudan	TELKOM	Speedy	100 Mbps	(0334) 886875	644.000/bln
70.	Kelurahan Jogotrunan		Speedy	Saat Ini : 3 Mbps	(0334) 887201	350rb / bln

No	SKPD	ISP	Produk	Bandwidth (Mbps)	Nomor Line/Telepon	Biaya per bulan
		TELKOM		Pengembangan : 5 Mbps		
71.	Kelurahan Tompokersan	TELKOM	Indihome	30 Mbps	(0334) 881940	902rb/bln
72.	Kelurahan Kepuharjo	TELKOM	Speedy	Saat ini : 3 Mbps Pengembangan : 5 Mbps	(0334) 8882432	300rb/bln



Gambar 4. 4 Persentase Alokasi Dana Sewa Bandwidth OPD

Ketersediaan pendanaan yang memadai merupakan salah satu elemen yang menentukan keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. Pendanaan di lingkungan pemerintahan disesuaikan berdasarkan tingkat prioritas kegiatan sehingga diperlukan komitmen yang baik oleh eksekutif ataupun legislatif untuk keberhasilan pengembangan dan implementasi e-government. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa total pendanaan yang dipergunakan untuk sewa bandwidth pada 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cukup besar yaitu Rp 228.613.283 per bulan. Dengan range dana terendah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp 217.000 dan dana terbesar adalah Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 28.800.000 per bulan.

E. Sistem Informasi

Kondisi sistem informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini dikelola oleh masing-masing OPD dan belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, antara lain :

- Dimana tidak semua OPD memiliki unit khusus pengelola website, konten yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Data yang tersedia kurang *update*;
- Hanya beberapa OPD yang menggunakan website dengan subdomain lumajangkab.go.id;
- Terdapat aplikasi yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

Berikut sistem informasi yang digunakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang :

Tabel 4. 5 sistem Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Lumajang

No	OPD	Aplikasi Saat Ini	Fungsi
1	Sekretariat DPRD	-	-
2	Inspektorat	Sistem Informasi Data Umum	Untuk input Data Umum
		Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pengawasan	Untuk Pelaksanaan Pengawasan
		Sistem Informasi Pengawasan	Untuk Pelaksanaan Pengawasan
		Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)	Untuk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Musrenbang	Merupakan aplikasi perencanaan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa.
		Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Sebagaimana amanat Undang Undang 23 Tahun 2014, Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Maka Fungsi SIPD untuk mengadministrasikan, serta mengolah data hasil pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi dan informasi serta sebagai bahan dalam mengambil suatu kebijakan
4	Badan Kepegawaian Daerah	simpeg.bkd.lumajangkab.go.id	Sistem informasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten lumajang.
		Aplikasi KP dan KGB	Aplikasi Dekstop untuk mencetak SK KP dan KGB

No	OPD	Aplikasi Saat Ini	Fungsi
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	bpkd.lumajangkab.go.id	subdomain Sebagai media komunikasi pemerintah dengan masyarakat
		<i>e-finance</i>	Untuk mengerjakan laporan keuangan secara online
		SIMBADA	Untuk pengelolaan aset
		SISAGA	Sistem Informasi Standart Harga
		SIMKASDA	Aplikasi untuk bidang perbendaharaan di BPKD
		SIMGAJI	Aplikasi pengolahan data gaji
6	Badan Pajak dan Retribusi daerah	36.81.203.211	Sebagai media pemeriksaan status pembayaran PBB-P2
		Smart Map	Sebagai informasi letak dan informasi umum obyek pajak PBB-P2
		SISMIOP	Untuk Pengelolaan Pajak PBB-P2
		SIMPADA	Untuk Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB-P2
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana	www.bpbd.lumajangkab.go.id	Sebagai media komunikasi BPBD dengan masyarakat
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	lumajangkab.go.id	Sebagai media komunikasi pemerintah dengan masyarakat
		portalberita.lumajangkab.go.id	Sebagai media untuk penyebaran informasi di lingkup pemerintahan secara elektronik dan up to date
		ppid.lumajangkab.go.id	Sebagai media pengelolaan, pendokumentasian, pengamanan, pengklarifikasian, dan penyediaan informasi di lingkup Pemerintahan.
		pengaduan.lumajangkab.go.id	Sebagai media pengaduan, saran, dan kritik untuk pemerintah secara online
		e-gallery.lumajangkab.go.id	Sebagai media pendokumentasian kegiatan pemerintahan secara online yang dapat diakses oleh masyarakat
		MRTG.lumajangkab.go.id	Sebagai aplikasi monitoring jaringan dan server
		Lpse.lumajangkab.go.id	Sebagai media pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
10	Dinas Pendidikan	-	-
11	Dinas Sosial	-	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK Biomorph Card Management Benrolled	- Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan - Aplikasi pencetakan KTP-el - Aplikasi perekaman KTP-el

No	OPD	Aplikasi Saat Ini	Fungsi
13	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
14	Dinas Pertanian	-	-
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inlish	Untuk pelayanan perpustakaan
16	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemembrdayaan Perempuan	Aplikasi.bkkbn.go.id	Untuk mengerjakan laporan program KB secara online
17	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.lumajangkab.go.id	Sebagai media komunikasi dan publikasi data pemerintah kepada masyarakat
		webgis.dlh.lumajangkab.go.id	Sistem ini dapat memberikan informasi letak, informasi umum dan fasilitas pelayanan kantor dinas.
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	www.wisatalumajang.com	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai media penyebaran informasi kepariwisataan kepada masyarakat - Sebagai media promosi pariwisata
19	Dinas Perdagangan	www.disperindag.kablumajang.go.id	Sebagai media informasi dengan masyarakat
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-
21	Dinas Tenaga Kerja	SISKO TKLN	Sistem komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
		TKA Daerah	Aplikasi Rekom TKA
		IPK	Laporan Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
22	Dinas Kesehatan	www.dinkes.lumajangkab.go.id	Sebagai media komunikasi Dinkes Lumajang dengan masyarakat
		Sik_lumajang	Untuk membantu pencatatan rekam medis Pengolahan laporan rawat jalan bulan dll
		Surat_menyurat	Membantu pencatatan surat masuk keluar
		Stat Planet	Aplikasi pembuatan peta gratis dari who untuk menampilkan capaian dalam bentuk peta (Wilayah Kerja Puskesmas)
23	Dinas Perhubungan	-	-
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	-
25	Dinas Perikanan	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Software Disposisi Surat	Untuk memperlancar disposisi surat menyurat serta pengarsipannya
		Software Kepegawaian	Untuk mengetahui informasi tentang Kepegawaian terkait Data-data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	OPD	Aplikasi Saat Ini	Fungsi
		Software IMB	Bisa menghitung perhitungan Biaya pengurusan IMB
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-
30	Satuan Polisi Pamong Praja	SIKD	Untuk Pengelolaan Keuangan
31	RSUD dr.Haryoto	SIMRS	Sebagai media pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi yang terintegrasi guna menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen di rumah sakit.
32	RSUD Pasirian	SIM RS	Untuk Billing Rumah Sakit
33	Bagian Administrasi Pemerintahan	SIGAP	Pengelolaan data gaji pegawai
34	Bagian Hukum	www.jdihlumajang.com	Sebagai media informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang
35	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	-
36	Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian	mindsed.lumajangkab.go.id	Sebagai Informasi Data perkonomian Kab. Lumajang
37	Bagian Pembangunan	smep.lumajangkab.go.id	Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek Kabupaten Lumajang
38	Bagian Organisasi	-	-
39	Bagian Umum	-	-
40	Bagian Humas dan Protokol	Db Gaji	Untuk pengelolaan gaji
41	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	-	-
42	Kecamatan Tempursari	-	-
43	Kecamatan Klakah	-	-
44	Kecamatan Sukodono	-	-
45	Kecamatan Sumpoko	-	-
46	Kecamatan Pasrujambe	-	-
47	Kecamatan	-	-

No	OPD	Aplikasi Saat Ini	Fungsi
	Candipuro		
48	Kecamatan Lumajang	SIPKADE	Sebagai media komunikasi pemerintah dengan masyarakat Untuk mengerjakan laporan keuangan secara online Untuk pengelolaan aset
49	Kecamatan Gucialit	-	-
50	Kecamatan Padang	-	-
51	Kecamatan Jatiroto	-	-
52	Kecamatan Tekung	-	-
53	Kecamatan Ranuyoso	-	-
54	Kecamatan Senduro	-	-
55	Kecamatan Pronojiwo	-	-
56	Kecamatan Tempeh	-	-
57	Kecamatan Kunir	-	-
58	Kecamatan Kedungjajang	-	-
59	Kecamatan Yosowilangun	-	-
60	Kecamatan Pasirian	-	-
61	Kecamatan Rowokangkung	-	-
62	Kecamatan Randuagung	-	-
63	Perusahaan Daerah Air Minum	JSMART	Untuk proses billing system dan pembacaan meter air
		pdam.lumajangkab.go.id	Untuk media informasi PDAM dengan Masyarakat
		SIP	Untuk menunjang pengerjaan laporan keuangan
64	PD. Semeru	-	-
65	PD. Bank Pasar	SIPT	Sistem untuk operasional PD. BPR Bank Pasar
		SID dan Labul BPR	Sistem untuk pelaporan bulanan, publikasi (triwulan) & laporan tahunan BPR
		SILK	Sistem untuk pelaporan bulanan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
66	Kelurahan Jogotrunan	www.jogogreen.blogspot.com	Sebagai media komunikasi pemerintah dengan masyarakat
67	Kelurahan Jogoyudan	-	-
68	Kelurahan Ditotrunan	-	-
69	Kelurahan Rogotrunan	-	-
70	Kelurahan Citrodiwangsan	-	-
71	Kelurahan	-	-

No	OPD	Aplikasi Saat Ini	Fungsi
	Tompokersan		
72	Kelurahan Kepuharjo	-	-

Tabel 4. 6 sistem Informasi yang direncanakan di Pemerintah Kabupaten Lumajang

No.	OPD	Aplikasi yang direncanakan	Fungsi
1.	Inspektorat	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang Terintegrasi	Pengawasan yang komprehensif
2.	Sekretariat DPRD	Web Resmi DPRD Kab. Lumajang	Sistem ini dapat memberikan informasi berupa seluruh kegiatan DPRD Kab. Lumajang dan juga Produk Hukum yang dihasilkan beserta informasi lainnya.
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi SITR (Sistem Informasi Tata Ruang)	Mengintegrasikan data/informasi sehingga semua informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penataan ruang dan lahan dapat diketahui secara cepat ,efektif an komprehensif
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	SI BOS	Sistem informasi laporan dana bos
5.	Badan Pajak dan Retribusi daerah	Monitoring Pajak Daerah Online	Sebagai sarana pemeriksaan dan pemantauan Pajak Hotel dan resto online
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
8.	Badan Kepegawaian Daerah	Anjab ABK	Analisis jabatan PNS.
		Formasi PNS	Mengetahui kebutuhan PNS
		Statistik Kepegawaian	Mengetahui statistik data kepegawaian.
		Diklat	Mengetahui analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan PNS.
		e-Learning BKD	Memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi dan digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar tanpa harus bertatap muka secara langsung.
		Baperjakat	Membantu stakeholder tertinggi dalam mengambil keputusan terkait promosi dan perpindahan PNS dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
		Prediksi	Mengetahui prediksi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun PNS.
		Kinerja PNS / SKP Online	Mengetahui kerja individu PNS.
Rekrutmen	Untuk rekrutmen CPNS dan pengisian jabatan terbuka.		

No.	OPD	Aplikasi yang direncanakan	Fungsi
		Absensi Fingerprint	Mengetahui absensi PNS yang bisa dipantau secara realtime.
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	SMS Center	Untuk media komunikasi pemerintah dengan masyarakat menggunakan SMS
10.	Dinas Pendidikan	-	-
11.	Dinas Sosial	WebGIS Pemetaan Kantor Dinas	Sistem ini dapat memberikan informasi letak, informasi umum dan fasilitas pelayanan kantor Dinas Sosial.
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data warehouse kependudukan	Penyediaan data kependudukan kepada instansi pengguna
13.	Dinas Ketahanan Pangan	Sistem Informasi Ketahanan Pangan Terpadu	System ini dapat memberikan informasi letak, informasi umum dan fasilitas pelayanan kantor dinas
14.	Dinas Pertanian	Web Dinas Pertanian	Publikasi Informasi Pertanian
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SI Surat Masuk & keluar	Pengolahan surat masuk dan keluar
		SI SPPD	Pengolahan data perjalanan dinas
		SKID	Untuk pelayanan kearsipan
16.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	-	-
17.	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Evaluasi Perizinan Berbasis Android	Mempermudah pelaporan, pemantauan perizinan pengelolaan lingkungan hidup
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-
19.	Dinas Perdagangan	-	-
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Web Dispora	Untuk memberikan informasi kepemudaan dan keolahragaan sekaligus pelayanan sewa tempat sarana dan prasarana olahraga
21.	Dinas Tenaga Kerja	e-SIMBADA	Untuk laporan aset
22.	Dinas Kesehatan	Aplikasi berbasis web	Untuk membantu pencatatan rekam medis Pengolahan laporan rawat jalan bulan dll yang didapat gratis dari kab jogja
		Star Planet	Aplikasi pembuatan peta gratis dari who untuk menampilkan capaian dalam bentuk peta (Wilayah Kerja Puskesmas)
23.	Dinas Perhubungan	GIS Perlengkapan Jalan	Sistem ini dapat mengetahui jumlah dan kebutuhan perlengkapan jalan
24.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	-
25.	Dinas Perikanan	Aplikasi Data Kepegawaian	Aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang data pegawai dinas perikanan

No.	OPD	Aplikasi yang direncanakan	Fungsi
		Aplikasi Data Kelompok/Pelaku Usaha Perikanan	Sistem ini dapat memberikan informasi letak, pengurus dan anggota kelompok, pendirian kelompok (tanggal, NIK, nomor BU, dll)
		Aplikasi Data Potensi Vegetasi dan Rehabilitasi/Penghijauan Kawasan Pesisir	Sistem ini dapat memberikan data potensi vegetasi, rehabilitasi/penghijauan kawasan pesisir
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-
28.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aplikasi Google Earth	Untuk mempermudah survey lokasi sebelum terjun ke lapangan
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIRAMA SIMPADU	Untuk proses sistem informasi penanaman modal Untuk proses aplikasi sistem pelayanan terpadu
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	Web Satpol PP	System ini dapat memberikan informasi tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sekaligus informasi tentang Penegakan Perda di Kabupaten Lumajang
31.	RSUD dr.Haryoto	Website RSUD dr.Haryoto	Sebagai media komunikasi RSUD dr.Haryoto Lumajang dengan masyarakat
32.	RSUD Pasirian	-	-
33.	Bagian Administrasi Pemerintahan	Tidak ada	-
34.	Bagian Hukum	Website JDIH Lumajang	Sistem ini dapat memberikan informasi produk 47okum daerah
35.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	-
36.	Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian	-	-
37.	Bagian Pembangunan	Aplikasi Monev	Sistem ini memudahkan dalam pelaporan kegiatan OPD
38.	Bagian Organisasi	-	-
39.	Bagian Umum	Sistem Informasi Administrasi Barang	Sistem ini dapat memberikan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan barang yang ada di Bagian Umum
		Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem ini dapat memberikan informasi tentang kepegawaian yang ada di Bagian Umum
		Sistem Informasi Surat	Sistem ini dapat memberikan

No.	OPD	Aplikasi yang direncanakan	Fungsi
			informasi tentang kegiatan surat menyurat yang ada di Bagian Umum
40.	Bagian Humas dan Protokol	--NIHIL--	--NIHIL--
41.	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	-	-
42.	Kecamatan Tempursari	Tidak ada	-
43.	Kecamatan Pronojiwo	-	-
44.	Kecamatan Candipuro	Sistem Informasi Administrasi Kecamatan	Untuk mengetahui data terkait dengan Perkantoran dan Kewilayahan
45.	Kecamatan Pasirian	-	-
46.	Kecamatan Tempeh	-	-
47.	Kecamatan Lumajang	-	-
48.	Kecamatan Sumpalsari	-	-
49.	Kecamatan Tekung	Web	Sistem ini dapat memberikan informasi letak, informasi umum dan fasilitas pelayanan kantor dinas
50.	Kecamatan Kunir	-	-
51.	Kecamatan Yosowilangun	-	-
52.	Kecamatan Rowokangkung	-	-
53.	Kecamatan Jatiroto	-	-
54.	Kecamatan Randuagung	-	-
55.	Kecamatan Sukodono	Tidak ada	-
56.	Kecamatan Padang	-	-
57.	Kecamatan Pasrujambe	-	-
58.	Kecamatan Senduro	-	-
59.	Kecamatan Gucialit	-	-
60.	Kecamatan Kedungjajang	Data warehouse kependudukan	Penyediaan data kependudukan kepada instansi pengguna
61.	Kecamatan Klakah	-	-
62.	Kecamatan Ranuyoso	-	-
63.	Perusahaan Daerah Air Minum	WebGIS Pemetaan Kantor PDAM Kab.Lumajang	Sistem ini dapat memberikan informasi letak, informasi umum, dan fasilitas pelayanan kantor PDAM Kab.Lumajang
64.	PD. Semeru	Web	Informasi dan Gambaran umum perusahaan
65.	PD. Bank Pasar	-	-
66.	Kelurahan Citrodiwangsan	Website Kelurahan Citrodiwangsan	Sebagai sarana komunikasi dan promosi wilayah Kelurahan Citrodiwangsan Kec.Lumajang
67.	Kelurahan Rogotruman	-	-

No.	OPD	Aplikasi yang direncanakan	Fungsi
68.	Kelurahan Ditotrunan	Web Kelurahan Ditotrunan	Memudahkan masyarakat mencari info tentang Kelurahan Ditotrunan
69.	Kelurahan Jogoyudan	Aplikasi Pelayanan Umum	Sistem ini dapat memberikan pelayanan secara maksimal
70.	Kelurahan Jogotrunan	Website Kelurahan Jogotrunan	Sebagai sarana komunikasi dan promosi wilayah Kelurahan Jogotrunan Kec. Lumajang
71.	Kelurahan Tmpokersan	SIP Kel.Tmpokersan	Memudahkan pelayanan kepada masyarakat melalui online tanpa harus datang langsung ke kelurahan
72.	Kelurahan Kepuharjo	-	-

Kehadiran media sosial dirasa sejalan dengan konsep demokrasi yang berkembang saat ini, dimana salah satu poin penting yang diharapkan adalah keterbukaan dan partisipasi. Pemerintah kini mulai membuka diri dan lebih teliti memanfaatkan kehadiran media sosial untuk membangun jaringan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Mengapa media sosial yang dipilih pemerintah sebagai jembatan komunikasi dikarenakan kondisi masyarakat dan kehadiran media sosial banyak menjadi perbincangan di dunia komunikasi. Selain karena fakta jumlah penggunaannya yang banyak, faktor keunikan media sosial sangat mendukung komunikasi di era perpindahan informasi yang sangat cepat saat ini. Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu sarana dalam mempromosikan, menyebarkan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan adanya saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan bersama. dengan terbangunnya jaringan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui media tersebut maka akan mempermudah Pemerintah dalam menginformasikannya program, visi, dan misi Pemerintah kabupaten Lumajang.

Berikut disampaikan daftar media sosial yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan kabupaten Lumajang dalam berinteraksi dengan antar institusi dan masyarakat.

Tabel 4. 7 Media Sosial yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lumajang

NO.	NAMA INSTANSI	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL
	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	Facebook Halaman FB Twitter Instagram Youtube	Pemerintah Kabupaten Lumajang @Lumajangkab @lumajang_kab @lumajang_kab Kabupaten Lumajang www.lumajangkab.go.id
I	SEKRETARIAT DAERAH		

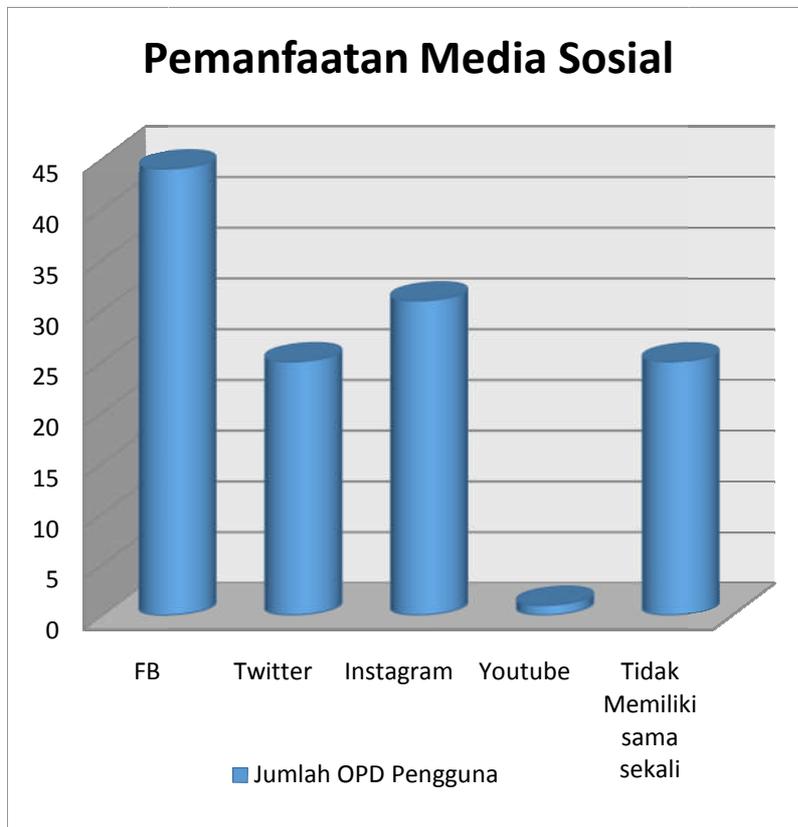
NO.	NAMA INSTANSI	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL
1	Bagian Administrasi Pemerintahan	Facebook Instagram Twitter	tapemlumajangkab tapemlumajangkab tapem_lumajang
2	Bagian Hukum	Facebook Instagram Twitter	- - -
3	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Facebook Instagram Twitter	Kesra Lumajang @bagiankesra.lmj -
4	Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam	Facebook Instagram Twitter	- - -
5	Bagian Administrasi Pembangunan	Facebook Instagram Twitter	bagpembangunanlmj@gmail.com <u>Bagian Pembangunan Lumajang</u> <u>pembangunanlmj</u> <u>@pembangunanlmj</u>
6	Bagian Organisasi	Facebook Instagram Twitter	<u>Bagian Organisasi Setda</u> <u>Kabupaten Lumajang</u> <u>Bag.organisasi</u> <u>BOragnisasi</u>
7	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Facebook Instagram Twitter Webblog	Humas dan Protokol Lumajang humasprotokolkablumajang humasdanprotokol lmj ; @humpro_lmj https://protalberita.lumajangkab.go.id/hal_press_release.php humasdanprotokolpemkablumajang.blogspot.co.id
8	Bagian Umum	Facebook Instagram Twitter	busdlumajang - @busdlumajang
9	Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Facebook Instagram Twitter	- - -
II	SEKRETARIAT DPRD	Facebook Instagram Twitter	Dprd Kabupaten Lumajang @dprd.lumajang @DPRDLumajang
III	INSPEKTORAT	Facebook Instagram Twitter	Inspektorat Lumajang - -
IV	DINAS		
1	Dinas Pendidikan	Facebook Instagram Twitter	- - -
2	Dinas Sosial	Facebook Instagram Twitter	Dinas Sosial dinsos_lumajang @dinsos_lumajang
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Facebook Instagram Twitter	- - -

NO.	NAMA INSTANSI	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL
4	Dinas Ketahanan Pangan	Facebook Instagram Twitter	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang - -
5	Dinas Pertanian	Facebook Instagram Twitter	<u>Dinas Pertanian Kab Lumajang</u> <u>@diperta.lumajang</u> <u>@diperta.lumajang</u>
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Facebook Instagram Twitter	- - -
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Facebook Instagram Twitter	Dinartaka Lumajang @dinartakalumajang @dinartaka-lmj
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Facebook Instagram Twitter	- - - -
9	Dinas Lingkungan Hidup	Facebook Instagram Twitter	DLH Lumajang - -
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Facebook Instagram Twitter	disparbudlumajang @disparbudlumajang @disparbudlumajang
11	Dinas Perdagangan	Facebook Instagram Twitter	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang - -
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	Facebook Instagram Twitter	Dispورا Lumajang @disporalumajang @dispورا_Lmj
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Facebook Instagram Twitter Whatsapp	Diskominfo Lumajang @diskominfoalumajang @KominfoLumajang www.lumajangkab.go.id 08113497722
14	Dinas Tenaga Kerja	Facebook Instagram Twitter	Disnaker kab lumajang @disnakerlmj -
15	Dinas Kesehatan	Facebook Instagram Twitter	dinkeslumajang - -
16	Dinas Pehubungan	Facebook Instagram Twitter	Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang - -
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Facebook Instagram Twitter	Dinkop Koperasi dan UKM Kab. Lumajang @dinkopukmlumajang @dinkopukmlumajang
18	Dinas Perikanan	Facebook Instagram Twitter	Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang @dinasperikanankab.lumajang @diskanlumajang

NO.	NAMA INSTANSI	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Facebook Instagram Twitter	Dinas Putr Lumajang - -
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Facebook Instagram Twitter	dpmd Kabupaten Lumajang dpmdlumajang DPMD_LUMAJANG
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Facebook Instagram Twitter	Dinaspkp Kablumajang DinasPKP_Lumajang -
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Facebook Instagram Twitter	Modal (dpmpstsp kabupaten lumajang) - - -
V	BADAN		
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Facebook Instagram Twitter	Bappeda Lumajang @bappedalumajang -
2	Badan Kepegawaian Daerah	Facebook Instagram Twitter	- - -
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Facebook Instagram Twitter	bpkd Lumajang (Pages : BPKD Kab.Lumajang) @BpkdLmj @BpkdLmj
4	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Facebook Instagram Twitter	- - -
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Facebook Instagram Twitter	Bakesbangpol Lumajang @bakesbangpol.lmj @bakesbangpolLMJ
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Facebook Instagram Twitter Whatsapps	Trc Bpbd Lumajang @bpbdkab.lumajang @pusdalopbpbdlmj https://bpbdkab.lumajangkab.go.id 081234570077
7	RSUD dr. Haryoto	Facebook Instagram Twitter	Rsudharyoto Lumajang - -
8	RSUD Pasirian	Facebook Instagram Twitter	- - -
VI	PERUSAHAAN DAERAH		

NO.	NAMA INSTANSI	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL
1	PDAM	Facebook Instagram Twitter	www.facebook.com/pdamlumajang g www.instagram.com/pdamlumajang g www.twiter.com/pdamlumajang
2	PD. BPR Bank Pasar	Facebook Instagram Twitter	Pdbprbankpasar Lumajang pd.bprbankpasarlumajang
3	PD. Semeru	Facebook Instagram Twitter	- - -
VII	KECAMATAN		
1	Kecamatan Lumajang	Facebook Instagram Twitter	<u>Kecamatan Lumajang</u> <u>@kecamatanlumajangsosial</u> <u>@kecamatanlmj09</u>
2	Kecamatan Sukodono	Facebook Instagram Twitter	Kecamatan Sukodono - -
3	Kecamatan Padang	Facebook Instagram Twitter	- - -
4	Kecamatan Gucialit	Facebook Instagram Twitter	Kecamatan Gucialit @Kec_Gucialit -
5	Kecamatan Senduro	Facebook Instagram Twitter	- - -
6	Kecamatan Pasrujambe	Facebook Instagram Twitter	- - -
7	Kecamatan Sumpoko	Facebook Instagram Twitter	- - -
8	Kecamatan Tempoh	Facebook Instagram Twitter	- - -
9	Kecamatan Pasirian	Facebook Instagram Twitter	- - -
10	Kecamatan Candipuro	Facebook Instagram Twitter	keCandipuro @keCandipuro -
11	Kecamatan Pronojiwo	Facebook Instagram Twitter	<u>Kecamatan Pronojiwo</u> <u>Kecamatan Pronojiwo /</u> <u>@kecamatanpronojiwo</u> <u>Kecamatan Pronojiwo /</u> <u>@kec_pronojiwo</u>
12	Kecamatan Tempursari	Facebook Instagram Twitter	Kecamatan Tempursari @kecamatan_tempursari @kec_tempursari
13	Kecamatan Kunir	Facebook Instagram Twitter	- - -

NO.	NAMA INSTANSI	JENIS MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL
14	Kecamatan Yosowilangun	Facebook Instagram Twitter	- - -
15	Kecamatan Tekung	Facebook Instagram Twitter	Kecamatan Tekung - -
16	Kecamatan Rowokangkung	Facebook Instagram Twitter	- - -
17	Kecamatan Jatiroto	Facebook Instagram Twitter	- - -
18	Kecamatan Randuagung	Facebook Instagram Twitter	- - -
19	Kecamatan Klakah	Facebook Instagram Twitter	- - -
20	Kecamatan Ranuyoso	Facebook Instagram Twitter	- - -
21	Kecamatan Kedungjajang	Facebook Instagram Twitter	- - -
VIII	KELURAHAN		
1	Kelurahan Jogotrunan	Facebook Instagram Twitter	Kelurahan Jogotrunan @kel_jogotrunan -
2	Kelurahan Rogotrunan	Facebook Instagram Twitter	Kelurahan Rogotrunan Kel.Rogo @kelurahanrogo11
3	Kelurahan Jogoyudan	Facebook Instagram Twitter	Kelurahan Jogoyudan - -
4	Kelurahan Ditotrunan	Facebook Instagram Twitter	- - -
5	Kelurahan Citrodiwangsan	Facebook Instagram Twitter	- - -
6	Kelurahan Tompokersan	Facebook Instagram Twitter	- - -
7	Kelurahan Kepuharjo	Facebook Instagram Twitter	- - -

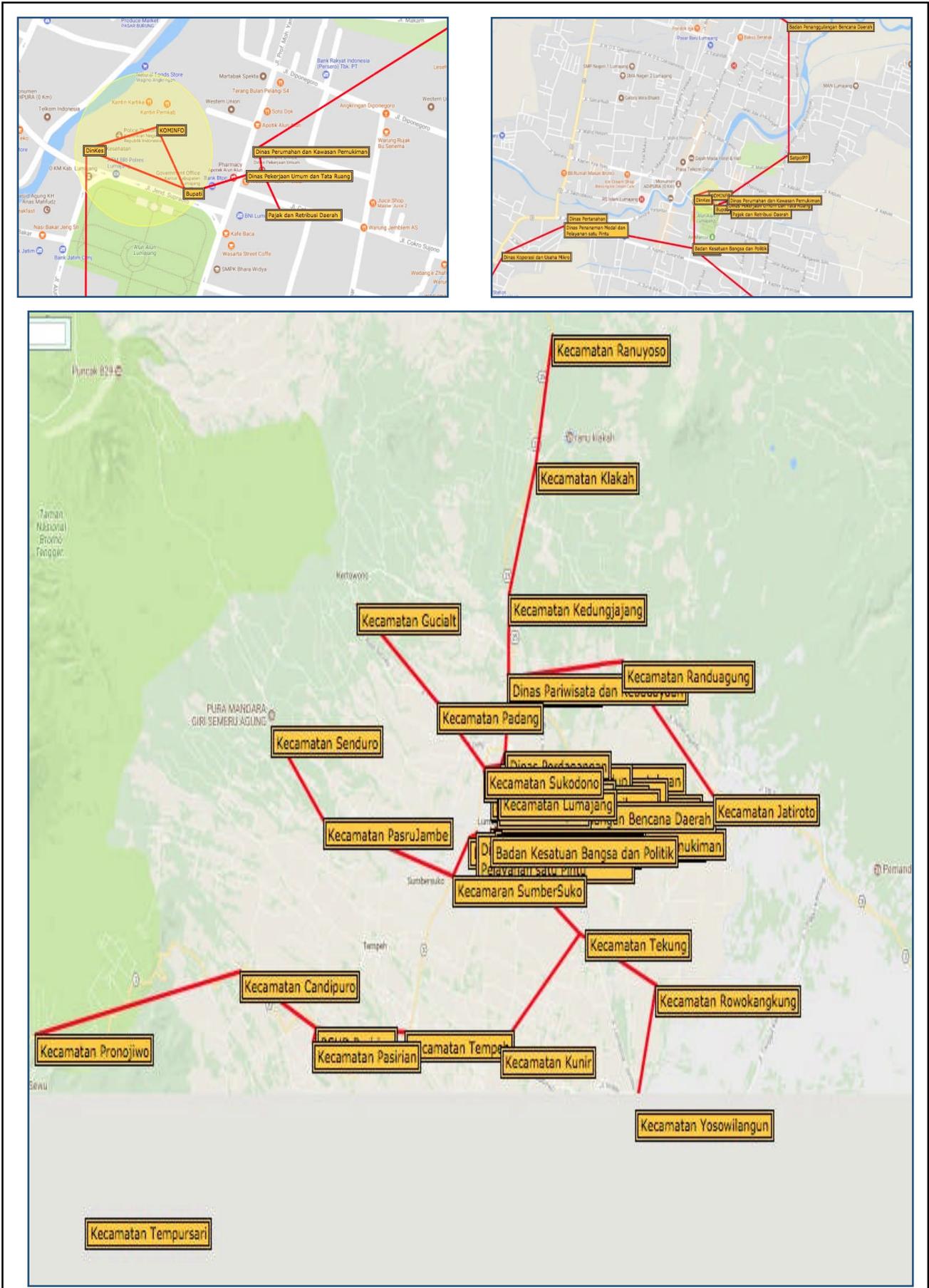


Gambar 4. 5 Grafik OPD Pengguna Media Sosial

Dari data yang ada, terdapat 65,28% dari 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki akun media sosial. Namun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki akun media sosial, hanya beberapa saja yang aktif. Mengingat salah satu tugas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan SKPD masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah.

F. Sebaran Titik-Titik OPD

Sebaran dan kondisi geografi wilayah kabupaten Lumajang sangat mempengaruhi penyusunan Master Plan TIK yang akan dilaksanakan. Selain mempengaruhi jenis jaringan yang akan digunakan juga akan mempengaruhi juga besaran anggaran pendanaan yang akan digunakan. Berikut akan kami sampaikan gambaran peta sebaran titik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) milik Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana pada gambar 4.6 di bawah ini.



Gambar 4. 6Sebaran Titik OPD Pemerintah Kabupaten Lumajang

PESI adalah suatu tool yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi eksternal dari organisasi. Selanjutnya hasil dari analisa eksternal organisasi ini akan digunakan sebagai masukan aspek Opportunities dan Threats dari analisis SWOT. Tabel berikut adalah poin-poin yang memuat bagaimana kondisi eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang saat ini.

Tabel 4. 8 Analisis PEST

Analisis PEST			
Politik	Ekonomi	Sosial	Teknologi
1.UU No.11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government	1. TIK merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi 2. Melalui pemanfaatan TI dapat menekan <i>cost</i> /biaya transaksi dan produksi	1. Meningkatkan komunikasi dan memfasilitasi pertukaran 2. Adanya interaksi pelayanan data melalui e-government/internet 3. Pemanfaatan TIK oleh masyarakat menuntut dukungan dari Pemerintah	1. Memudahkan koordinasi, kolaborasi, dan partisipasi sehingga terjadi pertukaran dan percepatan penyebaran informasi 2. Memudahkan pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan dalam jumlah besar

4.2 Analisis SWOT

Dalam penyusunan Masterplan TIK, selain dilakukan analisis terhadap hasil kuesioner juga perlu dilakukan analisis SWOT agar dapat mencapai kondisi ideal yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Terdapat beberapa komponen pokok yang akan dianalisis, yaitu sumber daya manusia, jaringan komputer/internet, hardware, software. Analisis SWOT ini digunakan untuk evaluasi sekaligus dapat mengidentifikasi beberapa masalah utama sebagai dasar penentuan rencana pengembangan e-Government. Selain itu, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan. Prioritas strategi pengembangan e-government kemudian disesuaikan dengan kondisi riil Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini.

Tabel 4. 9 Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> <p>INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITY)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak sumber dan tenaga ahli untuk pembelajaran TIK 2. Kemampuan dan dayaguna <i>hardware</i> semakin canggih dan mudah di <i>upgrade</i> 3. Ketersediaan <i>software</i> semakin lengkap dan mudah dipelajari (<i>user friendly</i>) 4. Database terpusat maupun tersebar sangat mudah diimplementasikan 5. <i>Software</i> pemroses data semakin berkembang 6. Layanan informasi terpadu dapat ditingkatkan dengan adanya layanan <i>e-Government</i> 7. Adanya Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-government</i> dan adanya Dinas Komunikasi dan Informatika yang diamanatkan dalam tata kelola TIK di lingkungan Pemkab. Lumajang 	<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya penguasaan perkembangan TIK akan mengakibatkan tertinggal dari daerah lain 2. Perkembangan <i>hardware</i> yang sangat pesat mengakibatkan <i>hardware</i> yang ada cepat ketinggalan 3. Perkembangan <i>software</i> yang cepat 4. Tuntutan penyajian informasi yang <i>up to date</i> 5. Penyalahgunaan data dan informasi 6. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat 7. Kurangnya standarisasi pengelolaan dan pemanfaatan TIK mengakibatkan tidak meratanya pelayanan masyarakat secara maksimal
<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SDM dengan kemampuan menggunakan komputer tergolong cukup 2. Seluruh OPD sudah memiliki komputer yang tergolong memadai 3. Hampir seluruh OPD memiliki <i>software</i> untuk menunjang kegiatannya 4. Seluruh OPD sudah memiliki jaringan internet 5. Adanya kesadaran pentingnya data yang akurat dan keinginan pemusatan data 6. Tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat 7. Adanya otonomi daerah memungkinkan Pemerintah Kabupaten untuk membuat peraturan pelaksanaan <i>e-Government</i> 	<p style="text-align: center;">STRATEGI SO</p> <p>Menggunakan Kekuatan Internal untuk Meraih Peluang Eksternal</p> <p>Mengoptimalkan Kekuatan dalam Memanfaatkan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan (CIO) 2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang TIK 3. Peningkatan <i>e- Chief Information Officer Leadership</i> pimpinan terhadap pemanfaatan TIK dalam sistem kerja instansinya 4. Pemanfaatan <i>hardware, software</i>, dan jaringan internet untuk layanan terhadap masyarakat yang lebih efektif 5. Peningkatan kapasitas SDM TIK di setiap OPD 6. Integrasi sistem pelayanan publik dalam database terpusat 	<p style="text-align: center;">STRATEGI ST</p> <p>Usaha untuk Menghindari atau mengurangi Dampak dari Ancaman Eksternal</p> <p>Memanfaatkan Keuatan dalam Menghadapi Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>e-Leadership</i>, dimana pimpinan dapat mempengaruhi bawahan untuk memahami manfaat teknologi dalam mencapai tujuan organisasi 2. Pemanfaatan insfrastruktur yang ada, baik <i>software, hardware</i>, dan jaringan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat 3. Sosialisasi intensif kepada pengelola TIK di instansi-instansi pemerintah

<p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> <p>INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITY)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak sumber dan tenaga ahli untuk pembelajaran TIK 2. Kemampuan dan dayaguna <i>hardware</i> semakin canggih dan mudah di <i>upgrade</i> 3. Ketersediaan <i>software</i> semakin lengkap dan mudah dipelajari (<i>user friendly</i>) 4. Database terpusat maupun tersebar sangat mudah diimplementasikan 5. <i>Software</i> pemroses data semakin berkembang 6. Layanan informasi terpadu dapat ditingkatkan dengan adanya layanan <i>e-Government</i> 7. Adanya Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-government</i> dan adanya Dinas Komunikasi dan Informatika yang diamanatkan dalam tata kelola TIK di lingkungan Pemkab. Lumajang 	<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya penguasaan perkembangan TIK akan mengakibatkan tertinggal dari daerah lain 2. Perkembangan <i>hardware</i> yang sangat pesat mengakibatkan <i>hardware</i> yang ada cepat ketinggalan 3. Perkembangan <i>software</i> yang cepat 4. Tuntutan penyajian informasi yang <i>up to date</i> 5. Penyalahgunaan data dan informasi 6. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat 7. Kurangnya standarisasi pengelolaan dan pemanfaatan TIK mengakibatkan tidak meratanya pelayanan masyarakat secara maksimal
<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penguasaan dan penggunaan TIK masih kecil 2. Tidak semua OPD memiliki penanggung jawab TIK 3. Belum terintegrasinya sistem di beberapa OPD dan belum seluruh OPD memiliki website resmi sebagai media keterbukaan informasi publik 4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan 5. Ketersediaan dan manajemen data/informasi masih lemah, terutama secara <i>online</i> 6. Kurang cepatnya tanggapan terhadap pengaduan dan kurangnya pemanfaatan TIK di tingkat kecamatan dan desa 7. Kurangnya petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan TIK 	<p style="text-align: center;">STRATEGI WO</p> <p style="text-align: center;">Memperkecil Kelemahan Internal dengan Memanfaatkan Peluang Eksternal Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan tentang pemanfaatan dan pengelolaan TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang 2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penggunaan TIK dengan memanfaatkan sumber dan tenaga ahli untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 3. Penerapan Hasil Audit Tata Kelola TI 4. Perbaikan pengelolaan data menuju pengembangan sistem terintegrasi 	<p style="text-align: center;">STRATEGI WT</p> <p style="text-align: center;">Memperkecil Kelemahan Internal dengan Memanfaatkan Peluang Eksternal Meminimalkan Kelemahan dalam Menghadapi Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan SDM terhadap perkembangan TIK secara berkala 2. Sosialisasi untuk membentuk <i>understanding</i> antar instansi dalam penerapan sistem terintegrasi yang merangkul seluruh instansi 3. Penempatan SDM sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki 4. Perbaikan kelemahan <i>software</i> dan <i>hardware</i> untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD

4.3 Kondisi Ideal

A. Kelembagaan

Aspek kelembagaan erat kaitannya dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Keberadaan organisasi struktural yang menjalankan fungsi *Government Chief Information Officer (GCIO)* untuk memastikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan dapat mendukung tujuan sistem kerja pemerintahan dengan memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terdiri dari infrastruktur informasi, jaringan dan teknologi, aplikasi, dan SDM. GCIO bertugas mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di institusinya masing-masing dan bekerja sama dengan satuan kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan satuan kerja pengguna lainnya, sehinggamemudahkan koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, GCIO juga bertugas melakukan *review* secara berkala atas pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pemerintahan Kabupaten Lumajang. Sebagaimana arahan menteri Kominfo dalam Peraturan menteri Komunikasi dan informasi Nomor 41 Tahun 2007, GCIO dipimpin langsung oleh Kepala Daerah dengan pelaksana harian dipimpin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan eselon tertinggi (Sekda).

B. Hukum dan Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan pimpinan yang memberikan arah dan garis besar tentang tujuan yang akan dicapai. Dalam pembangunan e-government diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah sebagai dasar dan pedoman bagi tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kebijakan berkaitan dengan produk hukum dan dokumen resmi yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kebijakan di level strategis terhadap e-goverent sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada dasarnya harus mengacu pada satu standar tertentu dimana salah satu contohnya adalah mengacu ke Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Namun sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang belum menggunakan standar apapun dalam pengelolaannya. Untuk itu Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diperlukan untuk mengukur sejauh mana keselarasan penerapan teknologi informasi dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Proses audit e-government diharapkan akan menghasilkan temuan-temuan yang berdampak bagi

keberlangsungan TI pemerintahan serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan proses tata kelola e-government.

C. Sumber Daya Manusia

SDM merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan e-government, baik pengelola maupun penggunanya. SDM yang terampil dan berkompeten dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mencapai keberhasilan kegiatan, selain itu dibutuhkan dalam penentuan keputusan yang tepat. Keberhasilan dalam investasi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) jika tidak didukung dengan SDM yang memadai serta kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang baik maka akan menghambat keberhasilan pencapaian tujuan e-government. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sangat menentukan serta penataan SDM yang memiliki kompetensi khusus bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selain hal tersebut diatas, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya memiliki Operator sesuai standar kompetensi sebagai berikut :

- a. Memahami konsep dasar komputer;
- b. Mampu menjelaskan berbagai perangkat komputer untuk akses internet;
- c. Mampu mengoperasikan aplikasi office atau sejenis;
- d. Mampu mengoperasikan aplikasi internet;
- e. Memahami kode etik di bidang TIK;
- f. Mampu melakukan *entry* dan updating data.

Mengembangkan SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menerapkan sistem kerja berbasis teknologi harus dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Peningkatan kemampuan SDM dapat dilakukan melalui :

1. Sosialisasi Peningkatan *e-Leadership* dengan sasaran pada level pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, *e-leadership* merupakan kemampuan membawa SDM yang dipimpinya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Website dengan sasaran Operator TIK setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana kompetensi yang diberikan terkait pengelolaan konten website di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

D. Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur Jaringan komputer adalah fasilitas untuk menyalin data dari satu komputer ke komputer lain tanpa memindahkan media penyimpanan data. Dengan fasilitas ini banyak hal bisa dilakukan. Dalam kaitannya dengan e-Government, jaringan komputer mutlak diperlukan bagi operator dan masyarakat luas untuk membaca informasi yang benar dan terbaru. Informasi melalui selebaran hanya punya nilai kebenaran pada saat selebaran tersebut diedit. Dengan jaringan komputer, masyarakat

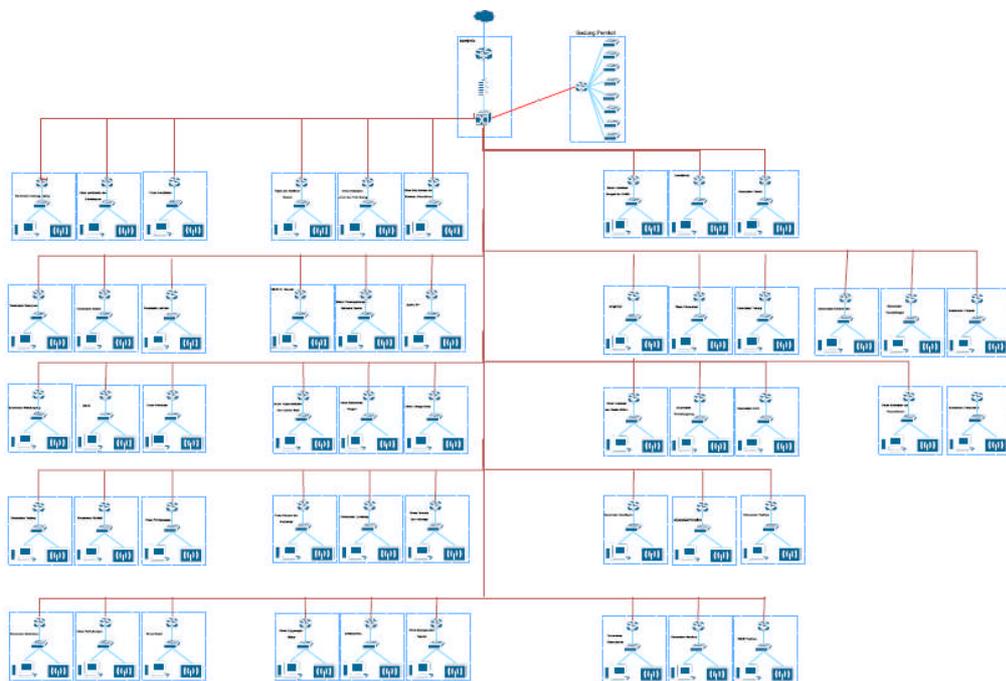
bisa melihat informasi yang diturunkan langsung dari pusat data pemerintahan. Disamping untuk membaca data, jaringan komputer juga diperlukan untuk memasukkan data. Dengan jaringan, kejadian di suatu wilayah dapat direkamkan langsung ke sistem penyimpanan data di pusat pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat luas langsung bisa mengetahui kejadian tersebut dengan akses ke pusat data.

Pada Masterplan TIK ini menawarkan 2 topologi infrastruktur jaringan yang dapat digunakan. Topologi pertama adalah keseluruhan infrastruktur terpusat di dinas komunikasi dan informasi, sedangkan topologi kedua adalah infrastruktur dengan memanfaatkan jalur terpendek yang akan disebarluaskan ke dinas-dinas yang pusat gateway berpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kedua topologi yang ditawarkan menggunakan Fiber Optik (FO) beberapa kelebihan penggunaan fiber optic adalah :

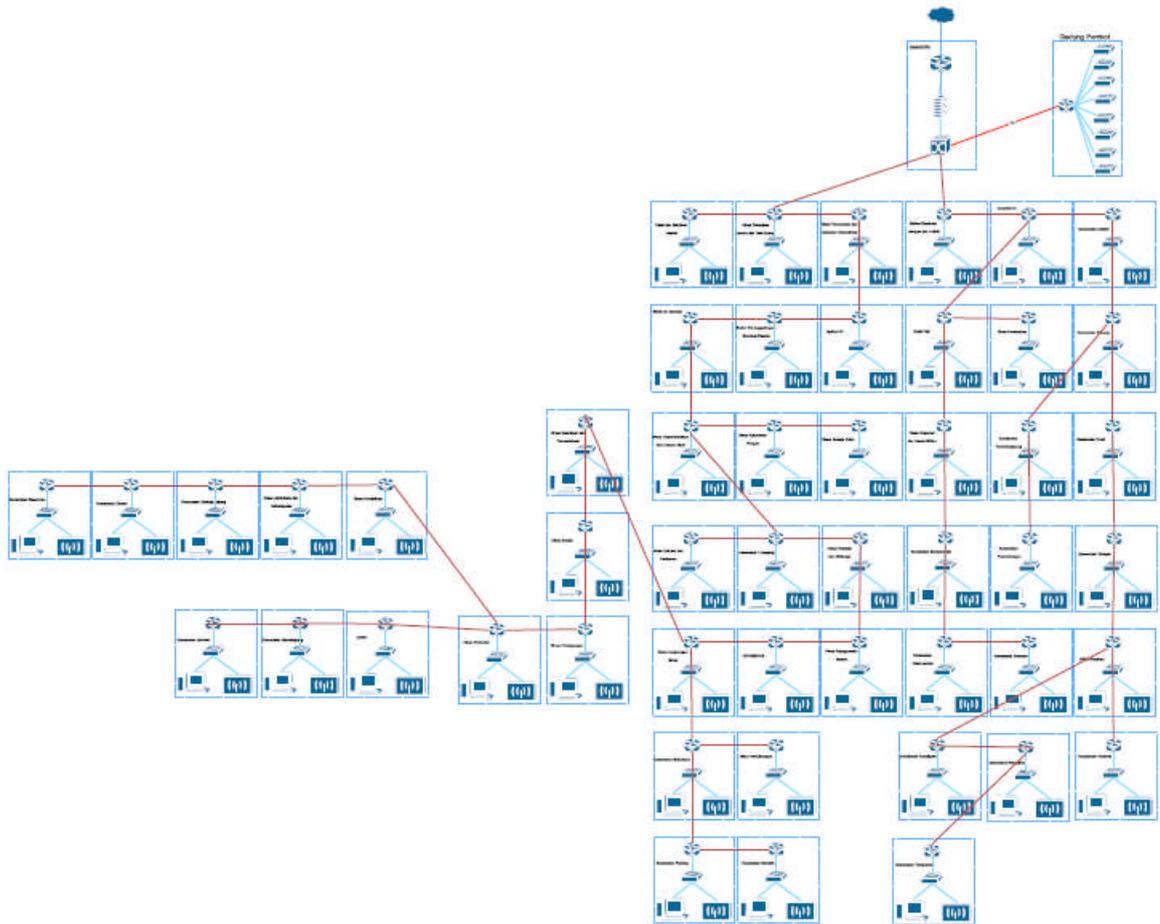
1. Bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit-per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan
2. Biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi
3. Ukuran kecil dan ringan, sehingga hemat pemakaian ruang
4. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio
5. Tidak ada tenaga listrik dan percikan api
6. Tidak berkarat

Berikut adalah topologi yang ditawarkan 1 :



Gambar 4. 7 Topologi 1

topologi ke 2 :



Gambar 4.8 Topologi 2

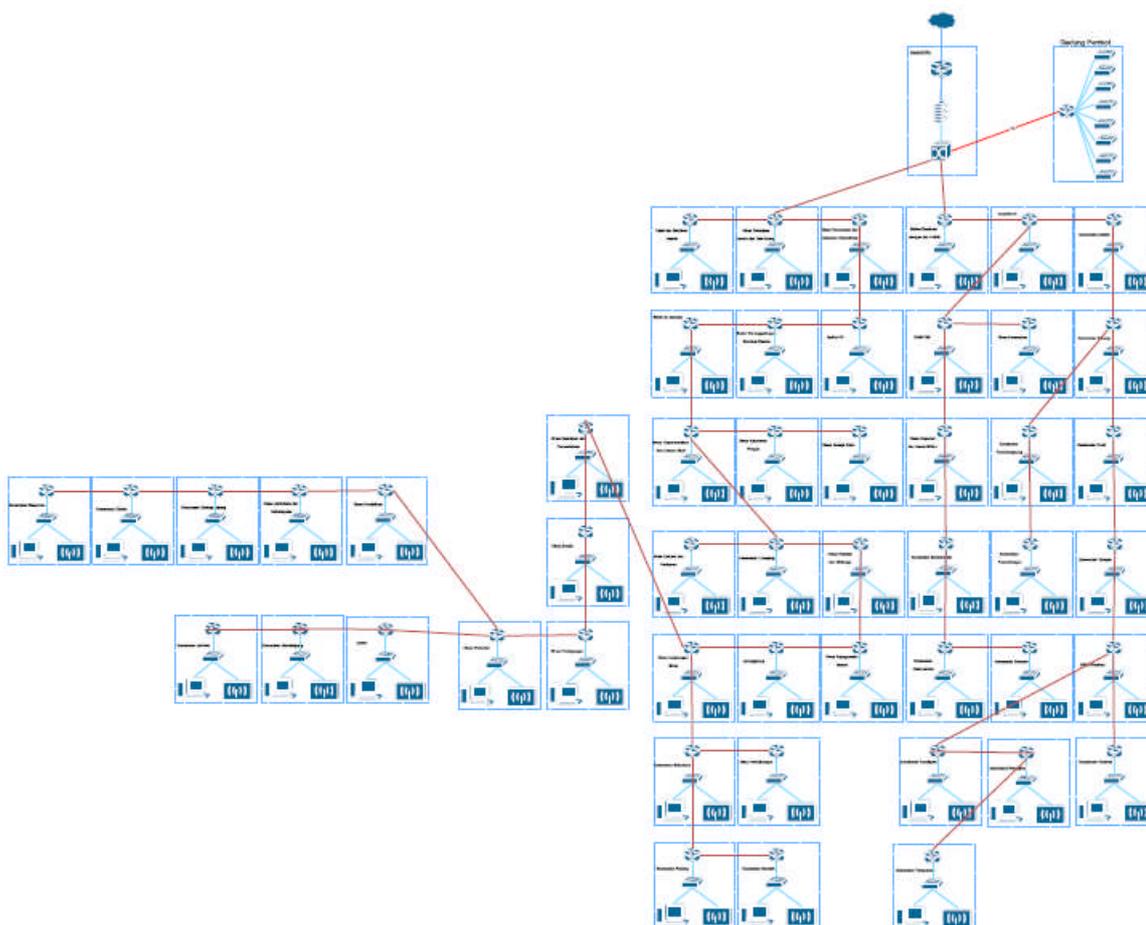
E. Sistem Informasi

Pembangunan sistem informasi termasuk strategi yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat 1 – Persiapan
 - Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
 - Penyiapan SDM;
 - Penyiapan sarana akses yang mudah;
 - Sosialisasi situs informasi baik internal maupun untuk publik.
2. Tingkat 2 – Pematangan
 - Pembuatan situs informasi publik interaktif;
 - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Tingkat 3 – Pemantapan
 - Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 - Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
4. Tingkat 4 – Pemanfaatan
 - Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.

BAB VKESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana yang ada, kondisi geografi, kondisi pendanaan serta ketersediaan jaringan yang baik internal maupun eksternal maka disimpulkan bahwa topologi infrastruktur dengan memanfaatkan jalur terpendek yang akan disebarluaskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana gateway berpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sistem jaringan yang dapat digunakan sebagai *backbone* / Jaringan utama yang akan dibangun sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas sebagaimana pada gambar di bawah ini



Gambar 5. 1 Topologi Hasil

Akan tetapi tipe jaringan yang akan digunakan merupakan gabungan dari jaringan kabel optik (FO) dan tipe jaringan wireless dimana penggunaan jaringannya akan disesuaikan dengan kondisi geografi yang ada sehingga diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah kabupaten Lumajang dapat terhubung dalam satu jaringan.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang mempengaruhi dalam perancangan dan penyusunan Master Plan TI yang meliputi aspek kelembagaan, aspek hukum dan kebijakan, aspek sumber daya manusia, aspek infrastruktur dan aspek sistem informasi.

Dalam rangka tindak lanjut tahap pengembangan sistem jaringan pada perancangan dan penyusunan Master Plan TI tahun 2017, Berikut beberapa masukan

kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait dengan pengembangan Master Plan TI adalah sebagai berikut :

1. Tindak lanjut dari penyusunan Master Plan TI yang telah dilakukan maka diperlukan adanya penetapan sistem jaringan yang akan digunakan sebagai landasan awal untuk menuju ke tahapan berikut yang berupa **Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah**.
2. Kebutuhan terbentuknya tim "**Task Force**" sebagai tim yang bertanggung jawab sebagai kepanjangan tangan **Top Manajemen** dalam hal ini bupati kabupaten Lumajang yang akan bertugas menjembatani antara pemerintah kabupaten Lumajang dengan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan. Sebagai landasan tim task force dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka diperlukan payung hukum dari Top Manajemen yang berupa **Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah** serta **Surat Keputusan Bupati**.
3. Terhadap kebutuhan unit-unit atau SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang diperlukan adanya penunjukkan personil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ketersediaan TI dan sarana prasarana sistem informasi. Tanggung jawab personil masing-masing SKPD adalah melakukan identifikasi ketersediaan TI dan sarana prasarana sistem informasi dan secara berkala melaporkan terkait kondisinya kepada tim task force. Penunjukkan tersebut dapat dilakukan dengan **Surat Keputusan Kepala OPD** atau kalau memang diperlukan dapat berupa **Surat Keputusan Bupati**.
4. Tentang tanggung jawab pemerintah kabupaten Lumajang terhadap pengembangan SDM dalam rangka implementasi master plan TI yang telah disusun maka diperlukan adanya **identifikasi dan pemetaan kebutuhan training atau sosialisasi** dalam rangka mendukung terselenggaranya implementasi tersebut.
5. Untuk menindaklanjuti hasil penyusunan Master Plan TI tahun 2017 maka diperlukan adanya identifikasi secara mendetail berupa audit terhadap keseluruhan sarana dan prasarana TI di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang. Tahapan ini diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan target sistem informasi yang akan dicapai.
6. Untuk jangka panjang perlu dilakukan penetapan kapan akan dilakukan penggunaan sistem informasi dalam mendukung e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan landasan atau payung hukum **Peraturan Daerah**.
7. Perlunya komitmen Pembentukan Komite TIK
Dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang jika tidak memungkinkan Pengelola TIK dipusatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka harus dibentuk Komite TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Perlunya Kajian tentang Pengelolaan Jaringan TIK yang terintegrasi
Kajian tentang Pengelolaan Jaringan TIK yang terintegrasi diperlukan untuk memetakan jaringan interkoneksi yang terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Pengelolaan Jaringan TIK yang terintegrasi berdampak pada peningkatan keamanan jaringan dan efektivitas alokasi pendanaan.
9. Perlunya Penyusunan Roadmap Pengembangan TIK
Roadmap yang merupakan rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya yang terkait Urusan Komunikasi dan Informatika.
10. Penggunaan Subdomain lumajangkab.go.id
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Pasal 4, yang menyebutkan bahwa lembaga pemerintahan daerah hanya boleh mempunyai 1 (satu) alamat situs web dengan nama domain go.id, sedangkan untuk struktur organisasi lembaga daerah untuk alamat situs webnya sebagai subdomain dari situs web lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap OPD harus memiliki situs web dengan menggunakan alamat subdomain lumajangkab.go.id.

Keberhasilan penerapan sistem yang telah disusun akan ditentukan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Terdapat beberapa faktor kunci yang menentukan keberhasilan perencanaan, implementasi, sampai tata kelola e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. *Komitmen dan e-Leadership*

Dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terutama di level pimpinan. Dimana pimpinan tertinggi di masing-masing SKPD harus memiliki wawasan tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan dan memiliki kemampuan *e-leadership* yang dapat mendorong dan mengarahkan bawahannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi. Pembangunan komitmen ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

2. Peningkatan Kualitas SDM

Perlu disadari bahwa teknologi informasi hanyalah sebuah alat yang tidak akan dapat menciptakan suatu perubahan apapun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan budaya kerja yang memadai untuk menjalankan alat-alat tersebut. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui bimbingan teknis maupun pelatihan baik internal maupun eksternal.

3. Adanya Perubahan Sistem Kerja dan Budaya Kerja

Perubahan proses dan budaya kerja yang dilakukan berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Seluruh elemen pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perbaikan proses

dan budaya kerja. Tingginya tingkat kemampuan beradaptasi ini adalah merupakan salah satu faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

4. Pendanaan

Tersedianya dana yang memadai menjadi penentu keberhasilan implementasi TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pendanaan implementasi dan pengelolaan TIK di lingkungan pemerintahan dapat dilakukan sepenuhnya internal atau bekerja sama dengan pihak luar dengan sistem kontrak. Pendanaan di lingkungan pemerintahan akan disesuaikan dengan prioritas kegiatan, sehingga perlu komitmen yang baik dari eksekutif maupun legislatif untuk keberhasilan pengembangan e-government

BAB VI PENUTUP

Ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus dapat dimanfaatkan untuk implementasi *e-Government*, sehingga tidak hanya dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang namun menjadi gerakan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Bupati untuk mencapai keberhasilan TIK di Kabupaten Lumajang. Seberapapun investasi yang diberikan untuk sarana dan prasarana TIK, tidak akan berjalan seimbang tanpa dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan kebijakan TIK yang dapat diimplementasikan dengan baik.

Apabila sistem perkantoran sudah lebih banyak berbasis teknologi maka ketergantungan pada teknologi menjadi semakin tinggi. Untuk itu perencanaan keberlanjutan sistem menjadi isu yang paling mendesak untuk segera disusun. Ini sejalan dengan semakin meningkatnya implementasi *e-Government* yang dilaksanakan melalui TIK dalam dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perencanaan TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang tercantum dalam Dokumen Masterplan TIK menjadi panduan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sebagai penunjang kelancaran jalannya kegiatan pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Dokumen Masterplan TIK Pemerintah Kabupaten Lumajang 2018 - 2019 ini merupakan buku induk yang disesuaikan sejalan dengan perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan, serta perkembangan TIK yang sangat cepat. Dokumen Masterplan TIK ini akan ditinjau kembali bilamana diperlukan, oleh Dinas Kominfo bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan.

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag